

**ANALISIS PENGARUH KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)**

(Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI



Oleh :

VELIA BRENDA YOHANA

NPM : 16011020

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2020**

**ANALISIS PENGARUH KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)**

(Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh :

VELIA BRENDA YOHANA

NPM : 16011020

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2020**

**ANALISIS PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH
DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)**

(Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

NAMA : VELIA BRENDA YOHANA
FAKULTAS : EKONOMI dan BISNIS
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
NPM : 16011020

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH :

Dosen Pembimbing



(Dr. Hj. Fatimah Riswati, S.E., M.S)

Ketua Program Studi



(Dr. Hj. Fatimah Riswati, S.E., M.S)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Velia Brenda Yohana

NPM : 16011020

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, juga tidak karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan hari ada klaim dari pihak lain, bukan tanggung jawab dosen pembimbing dan atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra. Tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri dan siap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Agustus 2020

Velia Brenda Yohana

**ANALISIS PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH
DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)**

(Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

VELIA BRENDA YOHANA
NPM : 16011020

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan telah direvisi sebagaimana
disarankan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

Susunan Tim Penguji
Ketua Penguji,



(Dr. Hj. Fatimah Riswati, S.E., M.S)

Penguji I



(Drs. Ign. Edy Hardjoko, MM)

Penguji II



(Aditya Surya Nanda, S.EI., M.SEI)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya :

Nama : Velia Brenda Yohana

NPM : 16011020

Menyerahkan karya tulis ilmiah saya kepada pihak Fakultas dan UPT Perpustakaan Universitas Wijaya Putra Surabaya yang berjudul :

“ANALISIS PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)”

Dengan penyerahan ini, saya memberikan hak kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun pihak UPT Perpustakaan Universitas Wijaya Putra untuk menyimpan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mengalih media, mendistribusikan dan mempublikasikannya di internet atau media lain, untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya, maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penullis

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 19 Agustus 2020

Yang menyatakan

Velia Brenda Yohana

MOTTO

“Ubah pikiranmu, maka kamu akan dapat mengubah duniamu”

(Velia Brenda Yohana)

“Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain.

Kita lah yang ditunggu-tunggu.

Kita adalah perubahan yang dicari”

(Barack Obama)

“The only way to do great work is to love what you do.

If you haven't found it yet, keep looking.

Don't settle”

(Steve Jobs)

“Sukses adalah berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain,
namun tanpa kehilangan semangat”

(Abraham Lincoln)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomik dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Wijaya Putra.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. H. Budi Endarto, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Wijaya Putra.
2. Dr. Soenarmi, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra.
3. Dr. Hj. Fatimah Riswati, S.E., M.S. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya, serta selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan membantu memberikan

saran-saran serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Aditya Surya Nanda, S.EI., M.SEI. selaku Dosen yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan membantu memberikan saran-saran serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra atas ilmu dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu dari awal sampai penyusunan skripsi ini.
6. Pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, khususnya Bapak Anwar telah banyak membantuan penulis dalam mendapatkan data-data yang diperlukan.
7. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Budiono dan Ibu Nunuk Mardianingsih terimakasih banyak atas doa yang senantiasa mereka panjatkan dan terimakasih juga atas dukungan moril yang selalu mereka berikan.
8. Untuk keluarga kedua penulis, Ibu Fitria Ningrum, Ibu Wahyu Puji , Bapak Susilo Hadi Utomo dan Bapak Akrom selaluku Paman dan Bibi penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat selama menuntut ilmu disini.
9. Seluruh keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuannya baik secara moral, material maupun doa.
10. Sahabat dekat penulis Ahmad Ilmiawan Putra yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Seluruh sahabat Bella, Vita, Finka, Abel, Jihan, Vizal dan Farhan yang selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman seperjuangan di kampus Nita, Lutfi, Ayu, Imel, Kartika dan Yeni yang tak kenal bosan menjadi teman diskusi dan sharing.
13. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya di bidang ekonomi pembangunan keuangan daerah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surabaya, 19 Agustus 2020

Penulis

Velia Brenda Yohana

ABSTRAK

Velia Brenda Yohana, 16011020, Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi penelitian ini adalah 58 pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan. Sampel diambil menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) yaitu dengan mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Data dianalisis menggunakan bantuan aplikasi WarpPLS 6.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* (2) Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* (3) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* (4) Kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Kata Kunci : Kinerja Aparatur Pemerintah, SPIP, Pengelolaan Keuangan Daerah, *Good Governance*

ABSTRACT

Velia Brenda Yohana, 16011020, Analysis of the Influence of the Performance of the Local Government Apparatus, the Government's Internal Control System and Regional Financial Management Against the Implementation of Good Governance (Good Governance)

This study aims to analyze and test the effect of the performance of local government officials, the government's internal control system and regional financial management on the application of good governance. This research is a quantitative study using primary data obtained from questionnaires. The population of this study was 58 employees of the Lamongan District Inspectorate. Samples were taken using a saturated sampling technique (census) that is by taking the entire population to be sampled. Data were analyzed by using the WarpPLS 6.0 application.

The results of this study indicate that (1) The performance of local government apparatus has a positive and significant effect on the implementation of good governance (2) The government's internal control system has no positive and significant effect on the implementation of good governance (3) Regional financial management has a positive and significant effect on the application of good governance (4) The performance of the regional government apparatus, the government's internal control system and regional financial management simultaneously have a positive and significant effect on good governance.

Keywords: Government Apparatus Performance, SPIP, Regional Financial Management, Good Governance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRAK INGGRIS	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II : TELAAH PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	17
2.1.1.1 Definisi Kinerja.....	17
2.1.1.2 Indikator Kinerja	19
2.1.1.3 Definisi Aparatur Pemerintah	21
2.1.1.4 Definisi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.....	22
2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	24
2.1.2.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal	25
2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal	27
2.1.2.3 Indikator Pengendalian Internal	28
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	29
2.1.3.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah	29
2.1.3.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah.....	32
2.1.4 Penerapan <i>Good Governance</i>	33
2.1.4.1 Definisi Penerapan	33
2.1.4.2 Definisi <i>Good Governance</i>	34
2.1.4.3 Indikator <i>Good Governance</i>	35
2.1.4.4 Tujuan Penerapan <i>Good Governance</i>	36

2.1.5 Keterkaitan Antar Variabel.....	38
2.1.5.1 Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	38
2.1.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	40
2.1.5.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	42
2.2 Penelitian Terdahulu.....	44
2.3 Kerangka Konseptual	62
2.4 Hipotesis Penelitian	63
BAB III : METODE PENELITIAN.....	64
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	64
3.2.1 Variabel Penelitian	64
3.2.2 Variabel dalam Penelitian.....	65
3.2.3 Indikator Variabel Penelitian.....	66
3.3 Lokasi Penelitian	70
3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	70
3.4.1 Populasi	70
3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	71
3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	72
3.5.1 Jenis Data dan Sumber Data.....	72
3.5.2 Metode Pengumpulan Data	73
3.6 Teknik Analisis Data	75
3.6.1 Konseptual Model	75
3.6.2 Analisis Deskriptif.....	75
3.6.3 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	77
3.6.4 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	78
3.6.5 Uji Hipotesis.....	81
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
4.1 Hasil Penelitian.....	82
4.1.1 Deskripsi Lokasi / Objek Penelitian	82
4.1.1.1 Profil Inspektorat Daerah Kab. Lamongan	82
4.1.1.2 Visi dan Misi Inspektorat Kab. Lamongan	83
4.1.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Lamongan.....	84
4.1.2 Definisi Responden	84
4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian	90
4.1.4 Hasil Analisis Data	97
4.1.4.1 Analisis Deskriptif	97
4.1.4.2 Uji Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	98
4.1.4.3 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	103
4.1.4.4 Hasil Uji Hipotesis	104
4.2 Pembahasan	110

4.2.1 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, SPIP dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> pada Inspektorat Kab. Lamongan	111
4.2.2 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	115
4.2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	116
4.2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	118
4.2.5 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, SPIP dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	119
BAB V : PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian	67
Tabel 3.2 Skala Likert	74
Tabel 3.3 Kriteria Uji Kecocokan Model.....	79
Tabel 3.4 Uji Kecocokan Model	79
Tabel 3.5 Pengukuran <i>R-Square</i>	80
Tabel 3.6 <i>Latent Variables Coefficient</i>	80
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Posisi/Jabatan	86
Tabel 4.2 Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	90
Tabel 4.3 Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	92
Tabel 4.4 Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah.....	93
Tabel 4.5 Variabel Penerapan <i>Good Governance</i>	95
Tabel 4.6 Hasil <i>Output</i> Uji Diskriptif	97
Tabel 4.7 Hasil <i>Convergent Validity</i>	99
Tabel 4.8 Hasil <i>Cross Loading</i> dan AVE.....	101
Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas	102
Tabel 4.10 Model <i>Fit Indices</i>	104
Tabel 4.11 <i>Indirect</i> dan <i>Total Effect</i>	107
Tabel 4.12 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	10 Lembaga Dengan Kasus Korupsi Terbanyak 2019 3
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual 62
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Lamongan 84
Gambar 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 85
Gambar 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 85
Gambar 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 87
Gambar 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Pendidikan 88
Gambar 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 89
Gambar 4.7	Model <i>Fit And Quality Indices</i> 103
Gambar 4.8	Model Penelitian 106

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar Kuisioner
- Lampiran 2. Jawaban Responden
- Lampiran 3. Karakteristik Responden
- Lampiran 4. Deskripsi Variabel
- Lampiran 5. Hasil Analisis Deskriptif
- Lampiran 6. Model Pengukuran (*Outer Model*)
- Lampiran 7. Model Struktural (*Inner Model*)
- Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 9. Copy Kartu Bimbingan
- Lampiran 10. Copy Surat Izin Penelitian dari Universitas
- Lampiran 11. Copy Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam otonomi daerah sejak era reformasi terhitung cepat dan signifikan sehingganya membawa perubahan pada relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Awalnya, sebelum era reformasi, transparansi terhadap pengelolaan keuangan rakyat dinilai kurang. Peristiwa tersebut terjadi sebab kurang mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan control terhadap petinggi-petinggi yang terikat, baik merupakan pihak internal atau eksternal yang tidak bekerja sama dalam memantau pekerjaan pemerintah di pusat dan daerah. Dari situlah maka muncul konsep *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dinilai dari segi transparansi pengelolaan keuangan rakyat sehingga terciptanya akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo dalam Weni Nirmala Sari (2017), *good governance* merupakan sebuah struktur dalam berbangsa dan bernegara yang pola atas tingkah lakunya didasari oleh prinsip dan ciri tertentu. Sebuah negara yang menerapkan *good governance* mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pada negara tersebut dilandaskan dengan prinsip partisipasi, pemerintahan sebagaimana hukum, transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling berhubungan.

Bukti lemahnya penerapan *good governance* di Indonesia salah satunya ialah masih maraknya pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenang sehingga banyak kasus terjadinya korupsi. Salah satu kasus korupsi yang telah terjadi adalah kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah di KPU Lamongan, 2015. Kejaksaan Negeri Lamongan telah menetapkan Bendahara KPU sebagai tersangka dengan nilai kurang lebih Rp. 1 miliar. Dinyatakan pula masih ada kemungkinan bahwa kasus tersebut memiliki tersangka lain (m.detik.com). Selain itu terjadi pula kasus korupsi perjalanan dinas pada dua anggota DPRD Lamongan tahun 2016 yang saat itu masih menjabat aktif yang masing-masing berasal dari fraksi PKB dan PDI Perjuangan. Dua anggota DPRD tersebut praktis menyusul empat tersangka kasus perjalanan dinas yang lebih dulu ditahan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan, yakni Ketua Komisi A, mantan Ketua Komisi B, mantan Ketua Komisi D DPRD Lamongan serta penyedia jasa perjalanan dinas (jatimtimes.com, diakses tanggal 12 Mei 2020).

Persoalan-persoalan tersebut adalah yang menyebabkan terganggunya proses perekonomian, yang memberi efek nyata seperti melonjaknya tingkat pengangguran dan bertambah banyak populasi penduduk miskin di Indonesia.

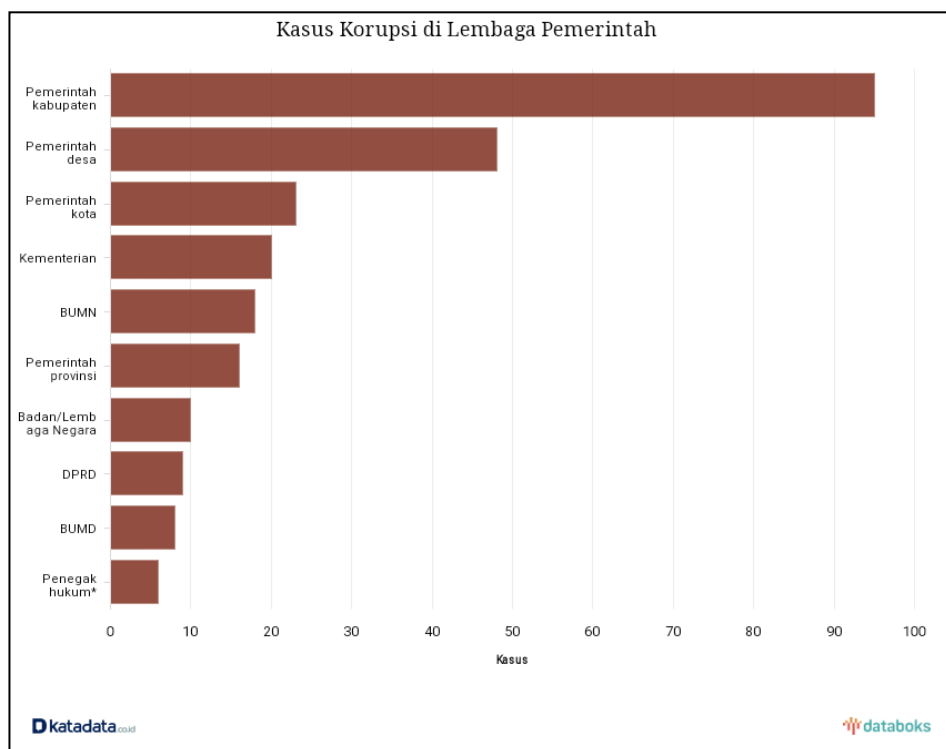
Salam (2004: 19) menyatakan bahwa, “Pemerintah yang baik dan jujur berkaitan dengan masyarakat yang mempunyai control sosial yang efektif, yakni termasuk ciri dari masyarakat demokratis dimana kehendak pemerintah dibatasi serta tidak mampu mengambil keputusan semauanya

terhadap warga negara termasuk melakukan penyelewengan dan menjalankan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).”

Pemerintah berupaya merealisasikan *good governance* yang tersendat sebab belum mencapai upaya yang maksimal dan masih banyaknya kasus korupsi di lembaga negara. Mengutip dari databoks.katadata.co.id 18/02/2020 menurut laporan dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang telah mengelompokkan 10 lembaga negara dengan tingkat korupsi tertinggi di tahun 2019 pada grafik berikut :

Gambar 1.1

10 Lembaga Dengan Kasus Korupsi Terbanyak (2019)



Sumber : databoks.katadata.co.id 18/02/2020

Berdasarkan data diatas, pemerintah kabupaten adalah lembaga terbanyak dengan 95 temuan kasus korupsi. Lalu disusul oleh pemerintah

desa dengan kasus kurang dari 50. Secara umum, kasus penggelapan uang yang terjadi di lembaga negara Indonesia berhubungan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah sepanjang waktu, kembali lagi pada tindakan yang tidak benar: menerima dan memberi suap. Sehingga, bagi Indonesia, untuk merealisasikan *good governance* adalah cita-cita yang sulit dan memerlukan kerjasama dari semua pihak.

Sebagai upaya pendorong penerapan *good governance*, ada beberapa faktor yang perlu dipikirkan di dalam instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Faktor yang pertama adalah kinerja aparatur pemerintah atau manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terkendali yaitu adanya manajemen yang adaptif, kondusif, dan reponsif. Maka, ciri dari *good governance* diharapkan bisa direalisasikan melalui langkah membangun kualitas manusia sebagai pelaku dari *good governance*. Untuk menjadikan atau menghasilkan manusia yang berkualitas dapat menempuh salah satu cara, yakni dengan mengokohkan sistem manajemen kinerja yang akan mendatangkan produktivitas agar terbentuk pemerintahan yang lebih baik (Sedarmayanti, 2012: 251)

Siti Indah Dhiyavani (2017) menyatakan bahwa pencapaian kerja aparatur pemerintah daerah adalah tingkat kesuksesan dan kegagalan saat menyelenggarakan acara sebagaimana tugas dan fungsi pokok aparat yang mendeskripsikan kinerja atau tujuan yang dilandasi oleh visi, misi, dan rencana dari instansi pemerintah.

Menurut Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2018, pemerintah kabupaten / kota menduduki posisi paling bawah dalam target penerapan rencana strategis. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kabupaten / kota masih jauh dibawah indikasi tingkat keberhasilan dalam mewujudkan sasaran / tujuan yang telah direncanakan.

Agar dapat merealisasikan *good governance*, tentunya dibutuhkan sistem pengendalian internal yang menyanggupi. Sistem ini sebagai faktor kedua untuk mewujudkannya *good governance*. Dalam pengertian pada PP Nomor 60 Tahun 2008, kepercayaan yang menyanggupi dicirikan dengan/melalui:

1. Efektivitas serta efisiensi operasi
2. Keunggulan dari laporan atas pendanaan
3. Penjagaan atas aset negara
4. Kepatuhan pada hukum dan kebijakan yang diterapkan.

Menurut IHP (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) Semester I Tahun 2019, mengenai Hasil Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menyatakan laporan pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2018 didapati 5.858 titik lemah. Sistem Pengendalian Internal yang terbentuk atas 1.826 persoalan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.753 persoalan klemahan sistem pengendalian penyelenggaraan anggaran

pemasukan dan belanja, serta 1.279 persoalan kelambanan koordinasi pengendalian internal.

Temuan kelemahan sistem pengendalian penyelenggaraan anggaran penghasilan dan belanja terjadi pada 531 pemerintah daerah yang termasuk didalamnya terdapat 8 kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan pengamatan intern yang tersedia tidak mencukupi atau tidak berjalan maksimal. SOP yang terdapat pada entitas pun demikian, sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pengendalian internal. Permasalahan kasus tersebut, yaitu: diberikannya penunjang profesi pengajar dengan kriteria yang tidak mencukupi dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan, pengurangan atas pendanaan kegiatan bantuan kesejahteraan guru non-PNS, sisa pemakaian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) belum diserahkan pada kas daerah dan pengeolaan penghasilan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban belanja BOS belum memenuhi kriteria. Penyebab utama dari mengapa terjadi kelemahan terhadap SDA adalah pengawasan intern terhadap organisasi pemerintah.

Menurut Siti Indah Dhiyavani (2017) kesuksesan sebuah organisasi pemerintahan bisa dipertimbangkan atas pengelolaan keuangannya. Sebab dengan pengelolaan keuangan, sebuah organisasi mampu meraih kesuksesan serta mendorong lancarnya progress dari sebuah kegiatan. Pengelolaan keuangan daerah sebagai faktor terakhir yang memutuskan kesuksesan dari implementasi *good governance*.

Pada perkembangan di era reformasi, otonomi daerah sudah bergabung menjadi hal yang memberi pengaruh pada pergantian paradigma atas pengelolaan pun pelaporan keuangan daerah dengan signifikan. Saat ini, pemerintah daerah diberi kepercayaan untuk mengatur dana umum dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya, pengelolaan keuangan daerah harus berjalan tertib, sebagaimana diatur dalam undang-undang, efisien dan efektif, ekonomis serta transparan, dan dapat bertanggung jawab dengan mengedepankan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 terkait perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terkait pedoman pengelolaan keuangan daerah: keuangan daerah yakni seluruh hak dan kewajiban sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang bisa dipertimbangkan dengan uang, termasuk semua jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sedangkan, pengelolaan keuangan daerah adalah semua tindakan yang mencakup perencanaan, penyelenggaraan, penata-usahaan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni kepada daerah, sebab posisinya memiliki kewajiban melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan. Sangat diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah manapun selalu berpedoman pada Asas-asas Umum Pengelolaan Daerah yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Agar tujuan negara dapat tercapai, tidak membuat kebijakan yang

menyimpang, dan dalam pengelolaan keuangan selalu transparan dan akuntabel, yang akan dapat mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara.

Yang merupakan makna tersirat atas kesuksesan pemerintah dalam menangani pengelolaan anggaran yakni saat mendapat penilaian “Wajar Tanpa Pengecualian / WTP”. Sebab itu, pemerintah diasumsikan sudah memenuhi aksebilitas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Pemerintah telah menempun berbagai cara dan rencana bersama lembaga pemerintahan dengan pemerintahan yang bersih (*clean government*) untuk mendapatkan predikat tersebut. (<https://www.bppkpd.id/opini-wtp/>)

Jika dilihat dari laporan BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lamongan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Melalui predikat WTP tersebut, pemerintah diasumsi sudah mencukupi kapabilitas, akuntabilitas, dan aksebilitas. Berbagai langkah dan cara yang ditempuh untuk memperoleh predikat tersebut telah dilaksanakan dengan baik sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan analisis dampak kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian intern pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada penerapan *good governance* antara lain dilakukan oleh Weni Nirmala Sari (2017) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)” menyatakan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah, variabel sistem pengendalian internal, variabel komitmen organisasi mempunyai dampak pada implementasi *good governance*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fandra Yovano Syafrion (2015) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)” menyatakan jika seluruh variabel yakni variabel sistem pengendalian intern, variabel pengelolaan keuangan daerah, serta variabel komitmen organisasi sama-sama mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Dalam penelitian Yusniyar, Darwanis, Syukriy Abdullah (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh)” menyatakan jika masing-masing variabel yakni sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern secara simultan ataupun parsial dan variabel pengendalian intern serta *good governance* secara simultan ataupun parsial sama-sama mempunyai dampak pada kualitas laporan keuangan.

Berikutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Wiwik Leping Kristiana, Made Arie Wahyuni, Edy Sujana (2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus Pada LPD Se-Kecamatan Sukasada)” menunjukkan jika tiga variabel mencakup sistem pengendalian intern, kinerja organisasi, dan budaya organisasi memberi pengaruh positif yang signifikan pada implementasi *Good Corporate Governance*. Kemudian variabel lainnya meliputi sistem pengendalian intern, kinerja organisasi, serta komitmen organisasi memberi pengaruh yang simultan pada implementasi *Good Corporate Governance*.

Penelitian oleh Sigit Prabawa, Herman Karamoy, Lidia Mawikere (2020) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance* (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa)” menggambarkan jika variabel sistem pengendalian intern berdampak positif dan signifikan pada langkah merealisasikan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Minahasa, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak mempunyai dampak positif terhadap langkah merealisasikan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Penelitian oleh Siti Indah Dhiyavani (2017) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance*” hasilnya menjelaskan

jika variabel kinerja aparatur pemerintah dan variabel implementasi standar akuntansi mempunyai dampak pada implementasi *good governance*, sedangkan variabel sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh pada implementasi *good governance*.

Penelitian oleh Ghina Adhha Haura, Afrah Junita, Tuti Meutia (2019) yang berjudul “Pengaruh Sistem Penegndalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi (Studi pada SKPK di Kota Langsa)” menyatakan beberapa variabel yang menunjukkan pengaruh positif yang signifikan pada implementasi *Good Governance* di antaranya variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, serta variabel Komitmen Organisasi. Sedangkan beberapa variabel sisanya menunjukkan tidak memberi dampak positif ataupun signifikan terhadap *Good Governance* di antaranya variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi, variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi, serta variabel Kinerja Aparatur Pemerintah daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi.

Jefri Herbert Mailoor, Jullie J. Sondakh, Hendrik Gamaliel (2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud)⁶⁶ yang menunjukkan bahwa empat dari lima variabel yang mencakup variabel Sistem Akuntansi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, variabel peran APIP, dan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada implementasi *good governance*. Sedangkan satu variabel sisa menunjukkan pengaruh yang negatif pun tidak signifikan yakni variabel Budaya Organisasi.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Jefri Herbert Mailoor dkk, menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) memberi pengaruh pada implementasi *good governance*, sementara penelitian oleh Siti Indah Dhiyavani menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal tidak mempunyai pengaruh pada implementasi *good governance*. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Weni Nirmala Sari yang menunjukkan variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*, sedangkan penelitian oleh Ghina Adhha Haura dkk menyatakan bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *good governance*. Dari uraian tersebut dapat diketahui ada perbandingan hasil penelitian yang bertolak belakang, yang mana pada penelitian Jefri Herbert Mailoor dkk menunjukkan hasil berpengaruh, sementara penelitian Siti Indah Dhiyavani menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Begitupun dengan

variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada penelitian Siti Indah Dhiyavani menyatakan berpengaruh sedangkan penelitian Ghina Adhha Haura dkk menyatakan tidak berpengaruh. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian kembali terkait penerapan atau implementasi *good governance* dengan judul **“Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan)”**. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu terdapat pada alat analisis yang dikembangkan. Yang pada umumnya penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah, namun disini peneliti memfokuskan untuk meneliti pada Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas audit internal pemerintahan daerah. Juga pada penelitian ini, penulis tidak hanya menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) juga pengelolaan keuangan daerah, namun juga menambahkan variabel kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai variabel independen yang masih terbilang jarang untuk diteliti terutama jika dikaitkan dengan *good governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian yakni:

1. Bagaimana diskripsi tentang kinerja aparatur pemerintah daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*?
2. Apakah pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *good governance*?
3. Apakah pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) terhadap penerapan *good governance*?
4. Apakah pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*?
5. Apakah kinerja aparatur pemerintah daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap penerapan *good governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *good governance*.

3. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) terhadap penerapan *good governance*.
4. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*.
5. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Aspek Praktis
 - a. Untuk mendeskripsikan pencapaian kinerja aparatur pemerintah daerah, Sistem Pengendalian Internal (SPIP) serta pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*.
 - b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan penerapan *good governance* serta bisa dimanfaatkan sebagai pembanding untuk memperluas wawasan pengetahuan.
 - c. Sebagai bahan referensi untuk berbagai pihak selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian sebagaimana topik penerapan *good governance* dan lingkup sekitarnya.

2. Aspek Teoritis

Sebagai wadah untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan keuangan daerah serta dapat berguna untuk memperkaya khasanah keilmuan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Definisi Kinerja

Peraturan Menteri Penyalgunaan Aparatur Negara No. Per/09/M.PAN/5/2007 menjelaskan bahwa “Penilaian atas kinerja yakni kegiatan manajemen yang terutamanya membandingkan tingkat kerja yang diraih sesuai standar, rancangan atau sasaran dengan memanfaatkan indicator kinerja yang sudah ditentukan”.

Menurut Anuar Sadat (2019) kinerja merupakan persenan partisipasi yang dilaksanakan oleh pekerja untuk peningkatan dan perkembangan lembaga tempat dia bekerja, yang mana dibutuhkan kinerja yang sungguh-sungguh. Kinerja dalam sebuah organisasi dinilai penting, sebab eksistensi kinerja akan menjadi penentu atas seberapa besar keberhasilan yang diraih, dan dapat pula diketahui seberapa baik tugas yang sudah diselesaikan sebagaimana tugas dan wewenang yang diamanatkan bisa dikerjakan secara nyata dan optimal. Kinerja organisasi yang sudah diselenggarakan dan mempunyai pencapaian tertentu nantinya perlu sesuai dengan misi yang disepakati sebagai landasar untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan.

Rendra Risto Wuri (2017) menyatakan bahwa kinerja (*performance*) terdiri dari dua suku kata *to perform* yang mempunyai definisi mengerjakan agenda sebagaimana tanggung jawab dan memberikan hasil sesuai dengan

prediksi, sedangkan *performance* adalah *things to do* atau sesuatu yang dilakukan. Kinerja adalah faktor dalam memutuskan upaya untuk memperoleh tingkat produktivitas yang baik pada organisasi, sebab itu upaya terhadap pemberian nilai atau predikat pada kinerja termasuk persoalan yang penting.

Menurut Febrina Astria Verasvera (2016) penilaian kinerja yaitu sebuah alat pengelolaan yang dimanfaatkan demi menaikkan kualitas dari penentuan hasil akhir dan akuntabilitas. Penilaian kinerja pun dimanfaatkan dalam hal menilai perolehan dari tujuan dan partisipan (*goals and objectives*) sebagaimana beberapa elemen yang melatarbelakanginya: [1] Perencanaan dan penetapan tujuan; [2] Pengembangan ukuran yang relevan; [3] Pelaporan formal atas hasil; dan [4] Pemanfaatan informasi.

Sejalan dengan definisi diatas, didapatkan bahwa kinerja merupakan usaha yang dioptimalkan oleh pegawai pada sebuah organisasi melalui tugas serta tanggungjawab yang sudah dikerjakan dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Febriana Astria Verasvera (2016) memaparkan terkait tujuan dari dilaksanakannya penilaian kinerja organisasi sector publik di antaranya:

1. Mengetahui tingkat perolehan dari cita-cita organisasi;
2. Mempersiapkan sarana pembelajaran pekerja;
3. Memaksimalkan kinerja di waktu selanjutnya;
4. Mempertimbangkan dengan sistematis perancangan dalam memutuskan penjatuhan *reward* dan *punishment*.

5. Memberi dukungan positif pada pekerja; dan
6. Membuat akuntabilitas publik yang baik.

Ketika menilai sebuah kinerja, ada tiga langkah yang harus ditempuh yakni penetapan indikator kinerja, penyatuan data kinerja, dan metode penilaian kinerja. Penetapan indikator kinerja adalah langkah pengenalan dan penggolongan indikator melalui sistem penghimpun data dan mengelola data atas informasi sebagai penentu atas perolehan dari kinerja acara atau program. Pada pengukuran kinerja pun dibutuhkan penetapan perolehan kinerja yang bermaksud untuk mencari tahu dan menimbang atas perolehan indikator sebagaimana kebijakan yang diterapkan.

2.1.1.2 Indikator Kinerja

Weni Nirmala Sari (2017) mengemukakan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran berdasar kualitatif pun kuantitatif yang mendeskripsikan level perolehan sebuah tujuan yang sudah ditentukan, dengan mempertimbangkan beberapa indikator yang dirinci sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (*Input*) yakni semua hal yang diperlukan supaya penyelenggaraan acara dapat terkoordinir untuk menghasilkan keluaran. Dan menegaskan pada penilaian karakteristik pribadi pekerja dengan prestasi kerjanya. Karakteristik yang menjadi pertimbangan atas penilaian mencakup ketaatan, loyalitas, kejujuran, kreatifitas, adaptasi, disiplin, inisiatif, motivasi, sopan santun dan mempunyai komitmen. Seperti:
 - a. Total dana yang diperlukan

- b. Total pekerja/SDM yang diperlukan
 - c. Total infrastruktur yang tersedia
 - d. Total waktu yang dihabiskan.
2. Indikator Proses (*Process*) yang menyatakan bahwa organisasi merancang ukuran program dalam beberapa aspek seperti efisiensi dan efektivitas juga keakurasian pada penyelenggaraan acara tersebut. Rambu yang diprioritaskan adalah seberapa efisien dan ekonomis sebuah selenggaraan acara organisasi ataupun instansi. Seperti:
- a. Kepatuhan pada kebijakan perundangan
 - b. Rata-rata kebutuhan untuk menciptakan pelayanan kinerja.
3. Indikator Keluaran (*Output*) yaitu apa yang dicita-citakan dapat diwujudkan dari sebuah kegiatan baik dalam bentuk fisik atau non-fisik. Indikator ini dimanfaatkan untuk menilai pengeluaran yang tercipta dari sebuah acara. Apabila dilakukan membandingkan keluaran, isntansi dapat meninjau penyelenggaraan kegiatan apakah sesuai sebagaimana rancangannya. Seperti:
- a. Total kinerja yang diciptakan
 - b. Kepastian dalam menghadirkan kinerja atau jasa.
4. Indikator Hasil (*Outcome*) adalah suatu hal yang menggambarkan fungsi dari keluaran pada acara dalam kisaran menangan (efek langsung). *Outcome* mendeskripsikan tingkat perolehan atas hasil yang meliputi urusan banyak pihak. Dengan indicator ini, organisasi bisa

mengetahui akan hasil yang didapat (*output*) layak atau tidak dipergunakan dan memberi manfaat yang luas untuk khalayak, seperti:

- a. Level kualitas kinerja
- b. Produktivitas para pekerja.

5. Indikator Dampak (*Impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Indikator yang memaparkan dampak dan perolehan kegiatan terhadap rakyat secara menyeluruh. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu. Misalnya:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Definisi Aparatur Pemerintah

Aparatur merupakan sekumpulan individu yang melaksanakan roda pemerintahan. Aparatur mempunyai wewenang strategis dalam pelaksanaan wewenang pokok pemerintahan dan pembangunan. Tugas dari aparatur sebagaimana bergantinya zaman, dituntut pada aspek mampu memerangi tantangan di masa depan.

Weni Nirmala Sari (2017) mengatakan aparatur pemerintahan yakni sekelompok manusia yang berdedikasi pada kepenringan negara dan pemerintahan yang berjabatan sebagai pegawai negeri dan semua anggota penyelenggara pemerintah yang mendapatkan kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari pemimpin negara.

2.1.1.4 Definisi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Dalam persepsi Handi Yuniar Lestiawan dan Bambang Jatmiko (2015) kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu kinerja individu atau kelompok dalam kisaran waktu yang ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah itu bisa di nilai dari banyaknya prestasi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah tersebut, jika semakin banyak prestasi yang dimiliki dan diimplementasikan maka kinerja aparatur pemerintah dinilai baik. Namun penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah melalui prestasi itu dilihat dalam jumlah kurun waktu tertentu baru dapat di katakan kinerja aparatur pemerintah baik.

Kinerja aparatur pemerintah sendiri memiliki tugas pokok dan fungsi yang sering disebut sebagai TUPOKSI. Menurut Suryo dan Jatmiko (2017) mendefinisikan TUPOKSI sebagai kesatuan tugas atau agenda yang dilakukan oleh para pekerja yang mempunyai aspek khusus serta berkesinambungan menurut sifat atau penyelenggaraannya untuk memperoleh cita-cita tertentu dari suatu organisasi.

Untuk menilai kinerja aparatur pemerintah daerah diperlukan alat ukur agar dapat menilai kinerja sesuai dengan yang dituju dan tepat pada sasaran. Sistem penilaian kinerja sektor publik (aparatur pemerintah daerah) yakni suatu sistem yang digunakan untuk tujuan memudahkan manager publik dalam menilai perolehan sebuah rencana dengan alat ukur *financial* dan *non financial*. Mekanisme penilaian kerja bisa digunakan menjadi alat pengelola

organisasi, sebab penilaian kinerja diperkokoh dengan penentuan *reward* dan *punishment system*.

Dalam penelitian Siti Indah Dhiyavani (2017) menyatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah adalah “posisi kesuksesan atau kegagalan penyelenggaraan agenda sebagaimana tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah daerah sebagai penggambaran terkait tingkat perolehan sasaran atau tujuan sebagai pemaparan dari visi, misi, dan rencana instansi pemerintah”.

Kinerja pemerintahan dikelompokkan sebagai dua bagian yakni kinerja berdasarkan keuangan maupun non keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan konsep *Value For Money* (VFM) di mana maksudnya kinerja pemerintah diukur atas dasar manfaat. Sedangkan kinerja non keuangan pemerintah diukur berdasarkan atas konsep tiga E yaitu efisien, efektif, dan ekonomis (Suryo dan Jatmiko, 2017).

Prinsip-prinsip *good governance* (Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategi) juga berpengaruh terhadap kinerja sektor publik, adanya dukungan dari prinsip-prinsip *good governance* maka dapat menunjukkan bahwa kinerja sektor publik dapat dilaksanakan atau dilakukan dan berjalan secara optimal.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Kebijakan perundangan dalam ranah keuangan negara menghadirkan implikasi dibutuhkannya sistem pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam hal akuntabel dan transparan. Pernyataan tersebut bisa diperoleh apabila semua tingkatan pemimpin melaksanakan agenda pengendalian atas seluruh program atau agenda di instansi masing-masing. Sehingga pelaksanaan kegiatan yang mencakup perencanaan, penyelenggaraan, pengamatan hingga pertanggungjawaban sebuah instansi pemerintah bisa dilakukan dengan teratur, terkoordinir serta efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang bisa menguatkan jika penyelenggaraan acara pada instansi pemerintah bisa memperoleh cita-citanya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara berkala, menjaga aset negara dan memotivasi kepatuhan terhadap kebijakan perundangan. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem pengendalian *intern* dimana implikasinya perlu mempertimbangan kepatutan dan keadilan, serta ukuran, kompleksitas dan sifat dan fungsi dari tugas instansi pemerintah.

Dalam pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara menegaskan peraturan berlanjut terkait keputusan sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah yang didasarkan pada ide bahwa sistem pengendalian intern berkaitan erat selama kegiatan, didorong oleh sumber daya manusia dan sekadar menyediakan kepercayaan yang memadai (bukan mutlak).

Sebagaimana pemaparan tersebut, dikembangkan unsur sistem pengendalian intern yang memiliki tugas sebagai pegangan pelaksanaan tolok ukur pengujian efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern. Pembaharuan dari sistem membutuhkan penilaian dari aspek sumber daya manusia, biaya serta manfaat, kejelasan kriteria dan penilaian atas efektivitas, dan pembaharuan atas teknologi informasi yang dilaksanakan secara komprehensif.

2.1.2.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut *Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission* (COSO) dalam Destriyani (2015), menjelaskan tentang definisi dari pengendalian intern yaitu suatu proses/langkah yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen serta karyawan yang dibentuk untuk menyediakan pegangan yang meyakinkan bahwa tujuan dari organisasi bisa terpenuhi dengan efisiensi dan efektifitas operasional, penyediaan laporan keuangan yang bisa dipercaya, kepatuhan pada perundang-undangan yang diterapkan. Implementasi sistem pengendalian intern berfungsi sebagai berikut:

1. *Preventive*: yakni pengendalian untuk meminimalisir kelalaian berupa kekeliruan.
2. *Detektive*: sebagai pendeteksi kesalahan, penyelewengan serta kekeliruan yang terjadi.
3. *Corrective*: untuk membenahi kelalaian, kelemahan dan penyelewengan yang terdeteksi.

4. *Directive*: untuk mengarahkan agar penyelenggaraan agenda dilaksanakan dengan baik.

5. *Compensative*: sebagai penyeimbangan kelemahan pada aspek kontrol.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terkait sistem pengendalian intern menjelaskan tentang:

a. Sistem pengendalian *intern* yakni metode yang integrasi pada aksi dan agenda yang dijalankan dengan kontinu oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan keyakinan atas terpenuhinya cita-cita organisasi dengan program yang baik, keunggulan pelaporan keuangan, penjagaan aset negara, dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan adanya pengendalian *intern*: (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan aset, (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

c. Sistem Pengendalian *Intern Pemerintah* (SPIP) yang dijalankan dengan menyeluruh di lingkup pemerintah pusat dan daerah.

Siti Indah Dhiyavani (2017) memaparkan, “Sistem pengendalian pemerintah berhubungan dengan laporan keuangan adalah proses yang dirancang untuk menghadirkan rasa percaya yang memadai atas laporan keuangan yang terstruktur sebagaimana standar akuntansi pemerintahan”.

2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Agar memperoleh kinerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, pimpinan lembaga/menteri, gubernur, walikota/bupati harus melaksanakan pengendalian atas program pemerintahan. Pengendalian atas pelaksanaan program pemerintah sesuai pada ayat (1), diselenggarakan dengan memegang landasar SPIP dalam Peraturan Pemerintah.

SPIP sesuai yang tertera pada ayat (2) memiliki tujuan untuk memberikan rasa yakin atas terpenuhinya efektivitas dan efisiensi perolehan dari tujuan pelaksanaan pemerintah Negara, keunggulan pelaporan keuangan, penjagaan aset serta kepatuhan pada peraturan undang-undang.

Tujuan penyelenggaraan tersebut dimaksudkan sebagai penentu pelaksanaan pengendalian sesuai dengan rancangan dan juga memastikan atas individu sudah memenuhi kualifikasi supaya pengendalian berjalan efektif. Tujuan dibentuknya sistem pengendalian intern yakni:

1. Supaya dapat menjaga aset negara (termasuk data negara)
2. Untuk memelihara laporan dengan detil, rinci dan akurat
3. Dalam rangka menciptakan informasi keuangan yang pasti, relevan dan andal
4. Untuk memastikan laporan keuangan dibentuk sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintah
5. Untuk efektifitas dan efisiensi operasi
6. Untuk memastikan kepatuhan atas ketentuan manajemen serta peraturan perundangan yang ditetapkan.

2.1.2.3 Indikator Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas unsur:

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 dijelaskan bahwa pemimpin instansi harus membentuk dan melestarikan lingkungan pengendalian yang menghadirkan sikap positif yang terkendali untuk implementasi sistem pengendalian intern dalam lingkup kerjanya, mencakup:

- a. Pemberlakuan nilai etika dan integritas;
- b. Tanggung jawab atas kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang terkendali;
- d. Penciptaan bagian organisasi sebagaimana yang diperlukan;
- e. Pendelegasian tugas dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Perancangan dan implementasi peraturan yang baik terkait bimbingan SDM.

2. Penilaian Risiko

Sebagai langkah dari penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah bisa menentukan tujuan pada level program, dengan berlandaskan pada kebijakan perundang-undangan yang mencakup:

- a. Penentuan cita-cita instansi dengan menyeluruh
- b. Penentuan maksud pada tiap agenda
- c. Pengenalan resiko
- d. Analisis resiko

- e. Manajemen resiko

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Meninjau sejarah otonomi daerah selama kurang lebih satu dasawarsa belakangan ini, secara keseluruhan belum terlihat hasil seperti apa yang diharapkan. Walaupun begitu, beberapa daerah menunjukkan hasil yang baik sebagaimana filosofi dari otonomi daerah sendiri. Ketidakberhasilan dari otonomi daerah sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan latar belakang. Salah satu faktornya yakni kesanggupan pihak daerah dalam memajemen keuangan dan harta daerah secara efisien, efektif, akuntabel dan berkeadilan. Faktor tersebut dapat diketahui sebab lemahnya perencanaan, pendanaan, penyelenggaraan, pengendalian, pengamatan serta pertanggungjawaban. Fakta menunjukkan bahwa otonomi daerah masih terlaksana dengan tidak tepat, buktinya adalah kasus-kasus seperti korupsi dan penyelewengan hak sebagai pimpinan hingga menyebabkan tidak adanya kemajuan dari pendapatan masyarakat di daerah.

2.1.3.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan terkait definisi keuangan daerah sebagai “seluruh hak dan kewajiban daerah yang bisa diukur dengan uang dan segala bentuk berbentuk uang dan barang yang merupakan kepunyaan daerah yang berelasi dengan penyelenggaraan atas hak dan kewajiban tersebut”. Sebagaimana definisi yang terkandung dalam pasal 156 tersebut, keuangan daerah mencakup unsur yang bisa dinilai dengan uang, seperti unsur hak

kewajiban daerah serta aset yang berelasi dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memaparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yakni semua program yang mencakup perancangan, penyelenggaraan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah sistem yang digunakan atau dijalankan dalam suatu pemerintah daerah atau suatu organisasi yang bertujuan atau berfungsi sebagai gambaran dari seluruh kegiatan yang ada dalam sistem pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengembangan, pertumbuhan, pelaksanaan, pelaporan, penata usahaan, pertanggung jawaban serta berfungsi sebagai pengawasan keuangan daerah.

Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah yang dipaparkan oleh Dhiyavani (2017) yakni bermaksud agar pengelolaan keuangan rakyat yang berada di tangan pemerintah dijalankan dengan transparan, mulai dari proses perancangan hingga pertanggung jawaban atas keuangan agar terbentuk akuntabilitas dalam pengelolaan. Dari penjelasan Dhiyavani dapat dikatakan bahwa seharusnya pengelolaan keuangan daerah itu dilaksanakan secara transparan dalam segi penyusunan dan pertanggung jawabannya serta ketepatan sasaran pengelolaan keuangan daerah agar mampu memenuhi keinginan masyarakat tentang konsep transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

UU Nomor 15 Tahun 2004 terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara, menyatakan perihal keuangan negara

harus diproses dengan teratur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan mempertunjukkan keadilan dan kepatuhan. Dengan demikian supaya dapat terealisasi pengelolaan keuangan yang baik, maka harus dilaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Serta dalam UU No. 15 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa ada empat pendapat yang diberikan pemeriksa yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan Menolak memberi Opini.

Menurut Weni Nirmala Sari (2017), tujuan dari pengelolaan keuangan daerah yakni:

1. Mengoptimalkan penggunaan sumber penghasilan suatu daerah.
2. Membuat oprimalisasi dari anggaran daerah yang lalu.
3. Sebagai dasar resmi dari sebuah program supaya lebih terarah dan tertib juga akan mempermudah dalam pengawasan.
4. Memudahkan koordinasi dari setiap institusi dan bisa diarahkan sebagaimana prioritas dan dituju oleh pemerintah daerah.
5. Sebagai wadah untuk meninjau kembali dan memberi kemudahan untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi pembiayaan setiap proyek atau keperluan lain yang diajukan oleh setiap institusi.

2.1.3.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut penelitian Teuku Fahrian Nagor (2015), psinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dibutuhkan untuk mengendalkan peraturan atas keuangan daerah dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan bahwa penentu keputusan bersikap berlandaskan sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya. Sebab itu, dalam langkah penentuan peraturan, langkah untuk meraih kesuksesan atas kebijakan yang telah ditentukan nantinya harus bisa ditindaklanjuti dan dikomunikasikan secara vertical ataupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Penentu kesuksesan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi dinilai dari pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang bertambah baik, kehidupan yang berlandas demokrasi bertambah maju, begitu pula dengan keadilan yang merata hingga keseimbangan pusat dengan daerah. Keadilan bisa terpenuhi jika pelaksanaan pemerintah daerah diatur dengan mempertimbangkan konsep dari *value for money*.

Pada konsep otonomi daerah, *value for money* adalah pengubangan yang akan mengarahkan pemerintah daerah memperoleh *good governanve*. *Value for money* akan dijalankan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Sebagai pendorong penyelenggaraan pengelolaan keuangan dana umum yang menggunakan

konsep dasar *value for money*, maka dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik.

3. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu melalui tahap evaluasi berkala untuk membandingkan anggaran dan pencapaian. Maka perlu dilakukan analisis varians (selisih) pada pendapatan dan belanja daerah supaya bisa secepat mungkin ditemukan penyebab dari adanya varians yang kemudian dapat ditindaklanjuti untuk diantisipasi ke depannya.

2.1.4 Penerapan *Good Governance*

2.1.4.1 Definisi Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan merupakan proses, cara, perlakuan menerapkan; pemasangan; penggunaan, yakni sebuah proses dari cara membuat hingga manfaat dari implementasinya.

Penerapan yakni perlakuan yang diterapkan oleh individu sebagai bagian dari penentuan yang telah disepakati sebelumnya. Penerapan dilakukan dalam ranah hasil kerja yang didapatkan melalui metode untuk diterapkan di masyarakat.

Beberapa ahli memaparkan pandangannya mengenai penerapan yang merupakan sebuah perlakuan yang dipelajari dari sebuah teori, metode, dan hal-hal yang lainnya untuk memperoleh suatu tujuan tertentu serta adanya kepentingan yang diharapkan dari kelompok atau golongan. Arti dari

penerapan sendiri adalah pengaplikasian atas sebuah metode, teknik, sistem atau teori.

2.1.4.2 Definisi *Good Governance*

Good governance atau struktur pengelola yang baik secara umum diartikan sebagai nilai-nilai yang baik. *Good governance* dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *good governance* dalam sektor pemerintah atau yang terkenal dengan julukan *good government governance* dan *good governance* dalam sektor privat atau biasa disebut dengan *good corporate governance*. Keduanya memiliki hubungan satu sama lain yaitu *government* sebagai pengendali *corporate*, maksudnya adalah jika sektor pemerintahannya memiliki nilai-nilai yang baik atau *good governance* maka sektor privatnya juga akan berjalan dengan nilai-nilai yang baik, sehingga akan menghasilkan pelayanan publik yang baik.

Menurut penelitian Yusniyar (2016) mengatakan bahwa *good governance* yakni sebuah langkah dan struktur yang dimanfaatkan dalam organisasi untuk mencapai kesuksesan usaha dan akuntabilitas organisasi dalam rangka merealisasikan nilai-nilai atau tata kelola pemerintah dalam kisaran waktu panjang dan dengan tetap memperhatikan kepentingan public sebagaimana peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Indikator tersebut meliputi elemen-elemen penting dalam *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan keadilan”.

“*Good governance* yakni proses yang megutamakan dari bagaimana sebuah organisasi bisa meningkatkan etos kerja dan terpenuhinya

masyarakat yang madani”, pengertian tersebut dijelaskan oleh (Lestiawan & Jatmiko, 2015).

Dalam hal penerapan *good governance*, sebenarnya tugas dari pemerintah itu sendiri adalah membelikan pelayanan publik. Untuk mencapai penerapan *good governance* maka pemerintah harus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahannya agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan aturan pemerintah serta dapat memenuhi keinginan masyarakat. Menurut Lestiawan dan Jatmiko (2015) *Good governace* didefinisikan sebagai tata kelola yang baik dalam suatu usaha yang didasarkan sikap professional dalam berusaha dan berkarya, selain itu *good governance* menerangkan perangkat peraturan yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan publik.

Menurut penelitian Neneng Siti Maryam (2016), Sadjijono menyatakan bahwa *good governanve* memiliki makna: “Program lembaga pemerintah yang dioperasionalkan sebagaimana kepentingan rakyat dan norma yang berjalan untuk mencapai cita-cita negara”. Sedangkan IAN & BPKP memaparkan bahwa *good governance* yakni bagaimana pemerintah berhubungan langsung dengan masyarakat dan mampu memanajemen sumber daya pembangunan.

2.1.4.3 Indikator Good Governance

Dalam penelitian Dwi Andayani Budisetyowati (2017) menurut *United Nation Development Program (UNDP)*, *Good Governance* memiliki 8 (delapan) ciri utama:

1. *Transparency* yang diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang berhubungan dengan acara pengaturan sumber daya publik pada berbagai pihak yang membutuhkan informasi.
 - a. Memajukan sistem akuntansi berlandaskan standar akuntansi dan aplikasinya untuk menentukan kualitas laporan keuangan
 - b. Menyerahkan informasi kepada publik yang akan memberi pengaruh signifikan terhadap pencapaian kerja pemerintah
2. *Responsiveness*, cepat dan tepat dalam menanggapi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
3. *Consensus oriented*, membentuk kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari masyarakat;
4. *Equity*, membuka kesempatan untuk semua masyarakat dalam perbaikan dan peningkatan kesejahteraan;
5. *Effectiveness and efficiency*, manajemen sumber daya dengan efisien;
6. *Accountability*, mempertanggungjawabkan seluruh tugas yang sudah dilakukan kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan;
7. *Strategi Vision*, pelaksanaan pemerintah dengan visi dan misi untuk masa depan.

2.1.4.4 Tujuan Penerapan *Good Governance*

Good governance mengutamakan proses, mekanisme, dan langkah-langkah peraturan yang resmi maupun tidak resmi yang mengatur organisasi yang mana aturan di dalamnya perlu dilaksanakan dan dipatuhi. *Good*

governance juga mementingkan optimalisasi efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang searah dengan cita-cita organisasi.

Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/72008 mengenai Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* mencakup:

1. Birokrasi yang jujur, yakni didalamnya baik sistem dan aparaturnya berupaya dengan sebaik mungkin dengan berlandaskan aturan dan nilai-nilai yang mungkin bisa menghambat hadinya perlakuan penyimbangan dan perbuatan buruk semacam korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efektif dan produktif, yakni birokrasi yang sanggup menghadirkan pengaruh positif terhadap masyarakat dan bisa melaksanakan agenda dengan cepat dan tepat guna menghemat waktu, biaya, serta tenaga.
3. Birokrasi yang transparan, yakni birokrasi yang terbuka kepada masyarakat karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat, bukan yang dilayani oleh masyarakat.
5. Birokrasi akuntabel, yakni birokrasi yang bertanggung jawab pada setiap langkah dan proses pencapaian kerja atau hasil dari agenda atau acara, berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya.

Good governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial, selain itu *good governance* dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu entitas secara keseluruhan.

2.1.5 Keterkaitan Antar Variabel

2.1.5.1 Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Pada penelitian Febrina Astria Verasvera (2016) memaknai kinerja adalah pendeskripsian atas progress dari pencapaian penyelenggaraan sebuah agenda atau acara atau peraturan dalam merealisasikan partisipan, maksud, visi, dan misi organisasi yang terkandung dalam perancangan skema strategis (*strategic planning*) sebuah organisasi. Pencapaian kerja aparatur adalah ekspresi kesuksesan atas perolehan dari cita-cita organisasi yang sudah ditentukan, yang menggambarkan kualitas dan jumlah hasil kerja yang diperoleh masing-masing aparatur ketika menjalankan tugasnya dan diberi dampak oleh kebiasaan dan perilaku aslinya. Isu utama dari penyelenggaraan otonomi daerah yakni terlaksanakannya pemerintahan yang baik. Dengan menjalankan *good governanve* memerlukan kinerja aparatur yang baik, responsive, kondusif, dan adaptif agar menciptakan karakteristik yang kuat.

Menurut Weni Nirmala Sari (2017), kinerja aparatur pemerintah daerah sangat diharapkan bisa memudahkan instansi pemerintah untuk membentuk kinerja yang baik dan layak. Apabila kinerja aparatur pemerintah daerah terus membaik, artinya kinerja tersebut bisa mendorong tata pengelolaan *good governance*.

Siti Indah Dhiyavani (2017) memaparkan *good governance* sebagai sebuah pelaksanaan atas pengelolaan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang searah dengan prinsip demokrasi, menghindari kelalaian atas penempatan alokasi dana investasi serta mencegah perilaku korupsi, mengoperasionalkan disiplin anggaran dan pembentukan *legal and political framework* atas pertumbuhan kegiatan usaha. *Good governance* adalah akhir dari penyelenggaraan otonomi daerah yang menciptakan birokrasi unggul dan professional, produktif, dan mampu menyajikan pelayanan prima pada masyarakat sehingga kinerja pihak yang memberi pelayanan memberi dampak pada terlaksanakannya *good governance*.

Karena hal tersebut, kinerja sebagai permasalahan utama yang berhubungan dengan *good governance*. Kinerja pemerintah seringkali berhubungan dengan tingkah laku aparatur sebab hal tersebut adalah tindakan yang akan memberi pengaruh ketika program dijalankan.

Dari hasil beberapa penelitian terhadulu mengenai Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagian besar mengungkapkan bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah memberi pengaruh signifikan pada penerapan *good governance*. Seperti didalam penelitian Siti Indah Dhiyavani (2017)

yang mengatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah membawa dampak signifikan dalam implementasi *good governance*. Kemudian pada penelitian milik Weni Nirmala Sari (2017) juga menyatakan hal yang serupa yakni kinerja aparatur pemerintah daerah membawa dampak yang signifikan dan positif pada implementasi *good governance*. Namun ada satu penelitian yang menyatakan bahawa terdapat hubungan yang signifikan tetapi negatif antara kinerja aparatur pemerintah daerah dengan penerapan *good governance* yaitu milik Ghina Adhha Haura dkk (2019).

Sesuai dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang banyak menyatakan jika kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance* bahwa jika kinerja aparatur pemerintah daerah dapat diukur dengan baik dan benar dengan melihat perolehan penyelenggaraan sebuah program atau acara dalam merealisasikan sasaran, visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut maka pemerintah daerah tersebut sudah termasuk dalam *good governance* atau dapat dikatakan sudah menerapkan *good governance*.

2.1.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Fandra Yovano Syafrion (2015) mengungkapkan pengendalian *intern* bisa menolong pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dan risiko kecurangan. Adanya pengendalian intern akan mencapai tujuan dari organisasi, diiringi dengan adanya pelaporan keuangan yang unggul dan

penjagaan harga organisasi yang akan mendukung kepatuhan akan kebijakan.

Program mengenai reformasi di Indonesia yakni membentuk pemerintah yang baik. Perlu diakui bahwa *good governance* belum mencapai tujuannya. Diperhatikan dari segi akuntansi sector publik ada persoalan utama yang menjadikan *good governance* tidak terselenggara dengan baik yakni sebab kurangnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Pengendalian intern mencakup peraturan dan langkah-langkah yang dimanfaatkan untuk memperoleh sasaran yang tepat dan menjamin atau menghadirkan informasi keuangan yang unggul serta jaminan lainnya seperti rasa patuh akan hukum yang ditetapkan.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal diterapkan dengan optimal dan sebaik mungkin yang memberikan efisiensi dan efektivitas dalam operasi, pelaporan keuangan yang dihasilkan unggul, aset negara yang dijaga ketat dan kebijakan yang diselenggarakan dengan sebaik-baiknya maka akan terbentuk *good governance*.

Dari hasil penelitian Weni Nirmala Sari (2017) memaparkan bahwa sistem pengendalian intern memberi dampak positif yang signifikan atas implementasi dari *good governance* dan untuk memperkuat pengajuan hipotesis maka dapat melihat dari hasil penelitian lain seperti penelitian milik Wiwik Lembang Kristiana dkk (2017) mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern memberi dampak positif yang signifikan pada implementasi *good governance*. Namun ada salah satu penelitian yang

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan tetapi negatif antara sistem pengendalian internal dengan penerapan *good governance* yaitu milik Siti Indah Dhiyavani (2017).

Dapat disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang banyak mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*, bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik pula penerapan *good governance*, sistem pengendalian internal dapat dikatakan baik jika sistem pengendalian internal telah memenuhi lima elemen yang dirancang dan di implementasikan untuk menyediakan tanggungan bahwa partisipan sistem pengendalian internal telah terpenuhi agar terlaksana penerapan *good governance*.

2.1.5.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diartikan sebagai pengelolaan secara keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, penyelenggaraan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah menurut Siti Indah Dhiyavani (2017), adalah di maksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dikendalikan oleh pemerintah dilaksanakan dengan seterbuka

mungkin mulai dari proses pembentukan hingga pertanggung jawaban untuk merealisasikan akuntabilitas dalam pengelolaan. Dari penjelasan Dhiyavani dapat dikatakan bahwa seharusnya pengelolaan keuangan daerah itu dilaksanakan secara transparan dalam segi penyusunan dan pertanggung jawabannya serta ketepatan sasaran pengelolaan keuangan daerah agar mampu memenuhi keinginan masyarakat tentang konsep transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu terkait pengelolaan keuangan daerah, beberapa memaparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memberi dampak pada implementasi *good governance*. Seperti hasil dari penelitian Weni Nirmala Sari (2017) yang berpendapat bahwa pengujian terhadap Pengelolaan Keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance*. Serta ada penelitian lain yang membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu penelitian dari Fandra Yovano Syafrion (2015). Dan pada penelitian Ghina Adhha Haura dkk (2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

Maka, sebagaimana hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengelolaan keuangan daerah bisa disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabilitas dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah tersebut sudah menerapkan *good governance* dengan baik dan benar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ditemukannya berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Government* di antaranya dikutip dari beberapa sumber, yaitu :

1. Weni Nirmala Sari (2017) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)” menyatakan bahwa semua variabel yang digunakan menunjukkan hasil memberi pengaruh terhadap implementasi *good governance*, variabel tersebut yakni kinerja aparatur pemerintah daerah; pengelolaan keuangan daerah; sistem pengendalian internal; dan komitmen organisasi.
2. Fandra Yovano Syafrion (2015) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)” menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh positif yang signifikan, variabel tersebut di antaranya sistem

pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi, serta budaya organisasi.

3. Yusniyar, Darwanis, Syukriy Abdullah (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh)” menggambarkan bahwa dua variabel baik secara simulatan juga parsial memberi dampak pada implementasi *good governance*, variabel tersebut yakni sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern.
4. Wiwik Leping Kristiana, Made Arie Wahyuni, Edy Sujana (2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus Pada LPD Se-Kecamatan Sukasada)” menunjukkan bahwa tiga variabel memberi hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* yakni variabel sistem pengendalian intern, kinerja organisasi, dan budaya organisasi. Variabel sistem pengendalian intern, variabel kinerja organisasi dan variabel budaya organisasi berpengaruh secara simultan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.
5. Sigit Prabawa, Herman Karamoy, Lidia Mawikere (2020) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance* (Studi Empiris Di

Kabupaten Minahasa)” menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Minahasa, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.

6. Siti Indah Dhiyavani (2017) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance*” yang menunjukkan bahwa tiga variabel dalam penelitian membawa pengaruh pada implementasi *good governance* yakni variabel kinerja aparatur pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Kemudian variabel sisanya yakni sistem pengendalian internal memberi hasil tidak berpengaruh pada implementasi *good governance*.
7. Ghina Adhha Haura, Afrah Junita, Tuti Meutia (2019) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi (Studi pada SKPK di Kota Langsa)” yang menampilkan bahwa beberapa variabel menunjukkan membawa pengaruh positif yang signifikan yakni variabel Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan. Dan beberapa variabel lainnya menyatakan tidak berpengaruh positif dan signifikan yakni variabel Kinerja Aparatur, SPIP dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi, Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi.

8. Jefri Herbert Mailoor, Jullie J. Sondakh, Hendrik Gamaliel (2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud)” yang menunjukkan bahwa beberapa variabel dominan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan yakni variabel Sistem Akuntansi Pemerintahan, Kinerja Aparatur Pemerintah, peran APIP, dan Sistem Pengendalian Intern. Lalu satu variabel yakni budaya organisasi menunjukkan tidak memberi pengaruh yang positif ataupun signifikan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul dan Sumber Pustaka	Tujuan	Variabel dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Weni Nirmala Sari (2017)	Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan <i>good governance</i> 2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 2. Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 4. Komitmen Organisasi 5. Penerapan <i>Good Governance</i> <p>Teknik analisis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap penerapan <i>good governance</i> 2. Manajemen Keuangan berpengaruh positif terhadap implementasi <i>good governance</i> 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap 	Variabel yang diteliti yaitu : kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan penerapan <i>good governance</i> .	Variabel dependen yang diteliti : komitmen organisasi, lokasi penelitian di Kab. Rokan Hulu, data dianalisis menggunakan metode <i>Statistical Product and Service Solution (SPSS) program ver.</i>

		(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)	<p>3. penerapan <i>good governance</i></p> <p>4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah terhadap penerapan <i>good governance</i></p> <p>5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan <i>good governance</i>.</p>	menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode <i>Statistical Product and Service Solution (SPSS) program ver. 20.0</i> .	<p>4. penerapan <i>good governance</i></p> <p>5. Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan <i>good governance</i>.</p>		20.0.
2	Fandra	Pengaruh	1. Untuk menguji	1. Sistem	1. Sistem	Variabel yang	Variabel

	Yovano Syafrion (2015)	Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)	<p>2. pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan <i>good governance</i> pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok.</p> <p>3. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan <i>good governance</i> pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok.</p> <p>4. Untuk menguji pengaruh</p>	<p>2. Pengendalian Intern</p> <p>3. Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>4. Komitmen Organisasi</p> <p>5. Budaya Organisasi</p> <p>6. Penerapan <i>Good Governance</i></p> <p>Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda.</p>	<p>2. pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i></p> <p>3. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i></p> <p>4. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan</p>	diteliti yaitu : Sistem Pengendalian Intern, pengelolaan keuangan daerah dan penerapan <i>good governance</i> .	dependen yang diteliti : komitmen organisasi dan budaya organisasi, lokasi penelitian di Kota Solok, data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda
--	------------------------	--	---	--	--	---	--

			<p>komitmen organisasi terhadap penerapan <i>good governance</i> pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok.</p> <p>5. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap penerapan <i>good governance</i> pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok.</p>		<p>terhadap penerapan <i>good governance</i></p> <p>5. Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i></p>		
3	Yusniyar, Darwanis, Syukriy Abdullah	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Akuntansi Pemerintahan 2. Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem akuntansi pemerintahan dan variabel 	Variabel yang diteliti yaitu : Pengendalian Intern dan	Variabel dependen yang diteliti : sistem akuntansi

	(2016)	Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap <i>Good Governance</i> dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh)	pemerintahan dan pengendalian intern secara bersama-sama maupu parsial terhadap <i>good governance</i> serta menguji pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPA di Pemerintah Aceh.	3. Intern 4. Penerapan <i>Good Governance</i> Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda	2. pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap <i>good governance</i> 3. Sistem akuntansi pemerintahan dan variabel pengendalian intern dan variabel <i>good governance</i> baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas	penerapan <i>good governance</i> .	pemerintahan, lokasi penelitian di Kota Aceh, data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda.
--	--------	---	--	---	---	------------------------------------	--

					laporan keuangan		
4	Wiwik Lembang Kristiana, Made Arie Wahyuni, Edy Sujana (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi Kasus Pada LPD Se-Kecamatan Sukasada)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan <i>Good Corporate Governance</i> 2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja organisasi terhadap penerapan <i>Good Corporate Governance</i> 3. Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Intern 2. Kinerja Organisasi 3. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> <p>Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>Good Corporate Governance</i> 2. Kinerja organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>Good Corporate Governance</i> 3. Budaya 	Variabel yang diteliti yaitu : Sistem Pengendalian Intern dan penerapan <i>good governance</i> .	Variabel dependen yang diteliti : kinerja organisasi, lokasi penelitian di Kec. Sukasada, data dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda.

			<p>4. penerapan <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>5. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh sistem pengendalian intern, kinerja organisasi, dan budaya organisasi terhadap <i>Good Corporate Governance</i>.</p>		<p>4. organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>5. Sistem pengendalian intern, variabel kinerja organisasi dan variabel budaya organisasi berpengaruh secara simultan terhadap penerapan <i>Good</i></p>		
--	--	--	---	--	--	--	--

					<i>Corporate Governanc</i>		
5	Sigit Prabawa, Herman Karamoy, Lidia Mawikere (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap <i>Good Governance</i> (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap <i>good governance</i> 2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap <i>good governance</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Intern 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. <i>Good Governance</i> <p>Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan <i>good governance</i> 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan <i>good</i> 	Variabel yang diteliti yaitu : Sistem Pengendalian Intern dan penerapan <i>good governance</i> .	Variabel dependen yang diteliti : akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, lokasi penelitian di Kab. Minahasa, data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda

					<i>governance</i> pada Pemerintah Kabupaten Minahasa		
6	Siti Indah Dhiyavani (2017)	Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> 2. Untuk mengetahui pengaruh Penglolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> 3. Untuk mengetahui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 2. Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Sistem Pengendalian Internal 4. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah 5. Penerapan <i>Good Governance</i> <p>Teknik analisis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i> 2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i> 3. Sistem pengendalian internal tidak 	Variabel yang diteliti yaitu : kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan penerapan <i>good governance</i> .	Variabel dependen yang diteliti : implementasi standar akuntansi pemerintah, lokasi penelitian di Kota Pekanbaru, data dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda

			<p>4. pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerapan <i>Good Governance</i></p> <p>5. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Standar Akunatnsi Pemerintah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>.</p>	<p>menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda</p>	<p>4. berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i></p> <p>5. Implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i></p>		
7	Ghina Adhha Haura, Afrah Junita, Tuti Meutia	Pengaruh Sistem Penegndalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal pemerintahan,	<p>1. Sistem pengendalian internal pemerintah</p> <p>2. Pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan</p>	Variabel yang diteliti yaitu : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengelolaan	Variabel moderasi yaitu : komitmen organisasi dan lokasi penelitian di Kota Langsa

	(2019)	Keuangan Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap <i>Good Governance</i> dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi (Studi pada SKPK di Kota Langsa)	pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap <i>Good Governance</i> dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi pada SKPK di Kota Langsa.	3. Kinerja aparatur pemerintah daerah 4. Good governance 5. Komitmen organisasi Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis Smart <i>PLS (Partial Least Square)</i>	signifikan terhadap <i>Good Governance</i> 2. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Good Governance</i> 3. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Good Governance</i> 4. Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan	Keuangan Daerah, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan <i>good governance</i> , dan alat analisis yang digunakan yaitu : Smart <i>PLS (Partial Least Square)</i>	
--	--------	--	---	--	--	---	--

					<p>terhadap <i>Good Governance</i></p> <p>5. SPIP, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>good governance</i> dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi</p>		
8	Jefri Herbert Mailoor, Jullie J.	Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan,	Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh	1. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan	1. Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh	Variabel yang diteliti yaitu : kinerja aparatur	Variabel dependen yang diteliti yaitu : sistem

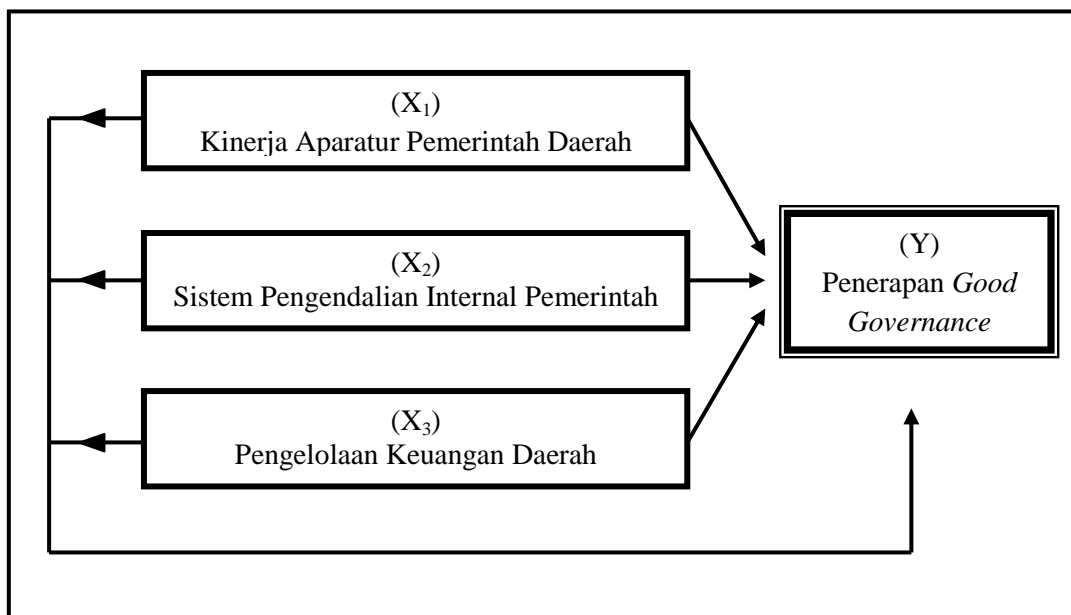
	Sondakh, Hendrik Gamaliel (2017)	Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud)	sistem akuntansi pemerintahan, budaya organisasi, kinerja aparatur pemerintah daerah, peran aparat pengawasan intern pemerintah, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan <i>good governance</i> di Kabupaten Kepulauan Talaud.	2. Budaya organisasi 3. Kinerja aparatur pemerintah daerah 4. Peran APIP 5. Sistem penegndalian intern pemerintah 6. Penerapan <i>good governance</i> Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis SPSS versi 23	positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> 2. Budaya organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> 3. Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap	pemerintah daerah, sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan <i>good governance</i>	akuntansi pemerintahan, budaya organisasi, peran APIP, lokasi penelitian di Kab. Kepulauan Talaud, dan data dianalisis menggunakan metode SPSS versi 23.
--	----------------------------------	--	---	--	--	---	--

					<p>penerapan <i>good governance</i></p> <p>4. Peran APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i></p> <p>5. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i></p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dideskripsikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sebagaimana gambar yang ditampilkan, penelitian ini mencakup tiga variabel independen yakni kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah. Variabel independent tersebut secara menyeluruh dimanfaatkan untuk memaparkan dampaknya pada implementasi *good governance*.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata “*hypo*” yakni bermakna di bawah serta “*thesa*” bermakna kebenaran. Hipotesis mampu dijabarkan sebagai sebuah hasil yang sifatnya sementara pada persoalan penelitian hingga memiliki bukti melalui data yang dikumpulkan. Hipotesis merupakan relasi yang diperkirakan secara rasional dari dua variabel atau lebih dalam rancangan yang mampu diuji secara empiris. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dipaparkan sebagai berikut:

1. Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.
2. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.
3. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.
4. Kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2015) memaparkan mengenai data kuantitatif yang merupakan pengolahan data berupa angka. Jadi, data kuantitatif adalah data yang nantinya bisa dianalisis dengan metode atau cara statistik. Data adalah berupa angka atau skor yang diperoleh dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data dengan pemberian skala skor.

Pada penelitian kali ini, penulis juga memanfaatkan metode asosiatif. Yang menurut Sujarweni (2015) merupakan penelitian yang bermaksud untuk mencari tahu keterkaitan antara variabel-variabel penelitiannya. Menggunakan penelitian ini dibutuhkan sebuah teori sebagai landasan yang akan memudahkan penulis untuk memaparkan dan membuat strategi. Berdasarkan definisi tersebut, penulis memutuskan untuk meneliti sebuah hubungan antar variabel yakni kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah terhadap variabel implementasi *good governance*.

3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Penelitian

Secara umum variabel didefinisikan sebagai karakter yang bisa diobservasi dari pengamatan yang menjadi bagian dari sebuah pengenal atau

atribut dari sekumpulan objek. Makna dari variabel yakni adanya variasi antara objek-objek yang berada dalam sebuah kelompok. Sugiyono (2016) memaparkan variabel penelitian sebagai semua hal yang ditentukan oleh peneliti untuk diamati atau ditinjau kembali untuk menghasilkan informasi yang valid dan bisa menarik kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan.

3.2.2 Variabel Dalam Penelitian

1. Variabel Independen (Variabel Bebas / X)

Variabel bebas dikenal dengan variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Sugitono (2016: 39) menjelaskan bahwa “Variabel bebas yakni variabel yang memberi dampak atau membawa perubahan atau menjadi pengaruh terhadap variabel dependen (terikat)”.

Pada penelitian ini yang berperan sebagai variabel independen atau variabel bebas yakni Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Siti Indah Dhiyavani (2017) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X_1) adalah penilaian atas kesuksesan atau kegagalan penyelenggaraan program yang menyesuaikan amanat atau tugas utama aparatur pemerintahan daerah yang berupa penggambaran mengenai tingkat perolehan sasaran atau maksud sebagai pemaparan dari misi, visi, dan strategi instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_2) yakni dijelaskan sebagai proses yang menyatu atas perlakuan dan agenda yang dijalankan secara

kontinu oleh pemimpin dan para pekerjanya untuk menghadirkan kepercayaan yang memadai atau berhasilnya memperoleh tujuan organisasi melalui program yang memberi pengaruh positif, keunggulan pelaporan keuangan serta penjagaan atas aset negara dan kepatuhan pada peraturan.

Dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan (X_3) merupakan seluruh agenda yang mencakup perencanaan, penyelenggaraan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat / Y)

Variabel dependen dikenal sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Sugiyono (2016: 39) menyampaikan bahwa “Variabel yang didorong atau yang terpengaruh diakibatkan oleh variabel bebas”. Variabel dependen dianggap sebagai faktor utama yang akan dipaparkan atau dikira-kirakan dan juga diberi pengaruh dari banyak faktor lainnya. Pada penelitian kali ini, yang menjadi variabel dependen adalah penerapan *good governance*.

Menurut Yusniyar (2016) implementasi *good governance* (Y) yakni sebuah proses dan struktur yang dipakai dalam organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian yang sukses atas upaya dan akuntabilitas organisasi dalam rangka merealisasikan nilai-nilai atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam kurun waktu yang lama dan tetap

memberi perhatian pada kepentingan public sebagaimana peraturan perundang-undangan dan etika.

3.2.3 Indikator Variabel Penelitian

Indikator variabel merupakan rincian dari variabel penelitian yang akan mengukur variabel tersebut sehingga dapat menggambarkan dan mendeskripsikan variabel sedemikian rupa menjadi spesifik, terukur dan dapat ditarik kesimpulan tertentu. Variabel-variabel yang akan diteliti sejumlah tiga variabel yang terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Variabel Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR	
(X ₁) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Weni Nirmala Sari)	1. Indikator Masukan (<i>Input</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Total dana yang diperlukan • Total pekerja/ SDM yang diperlukan • Jumlah infrastruktur tersedia • Total waktu yang dihabiskan
	2. Indikator Proses (<i>Process</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan atas peraturan atau kebijakan • Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa

	3. Indikator Keluaran (<i>Output</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kinerja atau jasa yang dihasilkan • Ketepatan dalam memproduksi kinerja atau jasa
	4. Indikator Hasil (<i>outcome</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai kualitas kinerja atau jasa yang tersedia • Produktivitas para karyawan atau pegawai
	5. Indikator Dampak (<i>Impact</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaksimalan kesejahteraan rakyat • Pemaksimalan penghasilan masyarakat
(X ²) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008)	1. Lingkungan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan integritas serta nilai etika • Kestabilan dalam kompetensi • Kepemimpinan yang kondusif • Penyusunan struktur organisasi sebagaimana yang dibutuhkan • Pendelegasian tugas dan tanggung jawab • Penyusunan dan implementasi kebijakan yang baik tentang pengarahan SDM • Merealisasi tugas aparat pengawasan intern yang efektif

	2. Penilaian Resiko	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan cita-cita instansi secara menyeluruh • Penetapan tujuan program • Identifikasi risiko • Analisis risiko • Manajemen risiko
(X ³) Pengelolaan Keuangan Daerah (Teuku Fahrian Nagor)	1. Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tertulis secara proporsional dan dikomunikasikan • Menentukan detail wewenang dan tanggung jawab individu
	2. <i>Value for Money</i>	Ekonomi, efisien dan efektifitas
	3. Pengendalian	Perlu dengan rutin melakukan evaluasi yaitu membandingkan anggaran dengan pencapaian
(Y) Penerapan <i>Good Governance</i> (Dwi Andayani Budisetyowati menurut <i>United Nation Development Program / UNDP</i>)	1. <i>Transparency</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem akuntansi sebagaimana standar akuntansi dan praktik terbaik untuk memastikan kualitas keuangan • Membagikan informasi keuangan dan lainnya yang membawa pengaruh signifikan pada kinerja pemerintah
	2. <i>Responsiveness</i>	Cepat dan tepat serta menyediakan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat

	3. <i>Consensus Orientation</i>	Membentuk peraturan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak
	4. <i>Equity</i>	Menyediakan peluang pada masyarakat untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan
	5. <i>Effectiveness and Efficiency</i>	Mengatur sumber daya yang dipunyai dengan efisien
	6. <i>Accountability</i>	Mempertanggungjawabkan seluruh wewenang yang sudah dijalankan pada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan
	7. <i>Strategy Vision</i>	Penyelenggaraan pemerintahan memiliki visi misi yang jauh kedepan

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan, yang terletak di Jalan Basuki Rahmad, Lamongan, Sukomulyo, Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62215.

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2017: 80) memaparkan bahwa populasi yakni bagian dari temoar yang menggeneralisasi objek yang memiliki kualitas dan ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis atau ditinjau kembali.

Dalam menentukan populasi adalah bagian penting dari penelitian. Populasi pada penelitian kali ini yakni Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan yang seluruhnya berjumlah 58 pegawai.

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah anggota dari populasi yang ditujukan untuk bisa mewakili populasi dalam penelitian. Sugiyono (2017: 81) menyatakan bahwa sampel yakni bagian dari total dan ciri yang dipunyai oleh populasi. Sampel diberlakukan karena peneliti mempunyai batasan kemampuan saat menjalankan penelitian. Sebab itu, peneliti perlu mengambil sampel yang merepresentatif (mewakikan) keseluruhan.

Ada beberapa metode dalam pengambilan sampel pada penelitian, sebagaimana dipaparkan oleh Sugiyono (2017: 81) bahwa metode pengambilan sampel yakni sebuah cara yang dapat memastikan sampel yang akan dimanfaatkan dalam penelitian yang tersebar dalam beberapa jenis metode atau teknik pengambilan sampel.

Umumnya, teknik sampling dikenal dalam dua kategori yakni *probability samping* dan *non-probability samping*. *Probability sampling* adalah peluang yang dimiliki oleh masing-masing anggota populasi sama besarnya, sedangkan *non-probability samping* yakni dimana anggota populasi mempunyai peluang yang beragam sebagai perwakilan untuk menjadi sampel (Nurmala, 2015).

Ketika memilih sampel, peneliti memperhatikan beberapa hal yang mendasar. Pertimbangan tersebut melihat kepada alasan atau *background*

atas persoalan yang sedang diteliti sebagaimana tertulis pada tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis memanfaatkan teknik *non-probability sampling*.

Jenis yang digunakan pada penelitian ini yakni teknik *non-probability sampling* jenuh. Sampling jenuh adalah cara menentukan sampel apabila seluruh anggota populasi dipastikan menjadi sampel. Hal tersebut dilakukan sebab total populasi sedikit atau penelitian yang bertujuan untuk membentuk generalisasi dengan kemungkinan kelalaian yang amat kecil. Julukan lain dari sampel jenuh yakni sensus: dimana seluruh anggota dijadikan sampel (Nurmala, 2015).

3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

3.5.1 Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dipakai untuk penelitian yaitu data kuantitatif, yakni pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan yang menjadi objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian kali ini terdiri atas data primer dan sekunder. Sugiyono (2014) memaparkan bahwa data primer yakni data yang diambil dari sumber pertama untuk individu maupun kelompok, seperti melakukan wawancara atau pengisian form. Sedangkan data sekunder yakni data primer yang telah dikelola lebih lanjut yang kemudian disediakan oleh pihak pengumpul data primer. Data sekunder

pada penelitian ini bersumber dari dalam dan luar. Data dari dalam (intenal) yakni bersumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan dan yang dari luar (eksternal) adalah sumber lain di luar organisasi yang dipublikasikan.

3.5.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian adalah sebuah usaha mencari terkait masalah tertentu. Para peneliti bisa menekankan kesatuan informasi dengan mendapatkannya dari sumber data yang berhubungan. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data yang dibutuhkan dengan memanfaatkan beberapa metode :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 - a. Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan proses mencatat secara tepat dan cepat serta teliti dan sistematis pada objek yang diamati langsung. Peneliti melakukan observasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan.
 - b. Kuisisioner/Angket, yakni cara mengumpulkan data yang dijalankan dengan menyediakan beberapa pertanyaan pun pernyataan tertulis kepada penanggap untuk ditanggapi (Sujarweni, 2015: 98). Kuisisioner yakni bagian dari pengumpulan data yang dinilai baik apabila peneliti sudah mengetahui dengan jelas variabel yang akan dinilai serta harapan dari responden. Untuk melakukan penilaian atas respon dari kuisisioner, skala yang dipakai yakni skala *likert*. Skala *likert* berfungsi untuk menilai sikap, persepsi, dan seseorang

atau kumpulan orang terkait persoalan sosial. Adapun alternatif jawaban dalam skala *likert* diberi skor yakni:

Tabel 3.2

Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang setuju	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Penyebaran kuisisioner dijalankan dengan menghubungi dan memberikan langsung kuisisioner kepada partisipan. Setiap kuisisioner mencakup pertanyaan terkait kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap *good governance*.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan studi kepustakaan, yakni melalui metode mempelajari, mengkaji, serta menelaah jenis literatur berupa buku, undang-undang, artikel, juga penelitian pada waktu terhadulu dengan isi yang berhubungan pada persoalan yang sedang diangkat sebagai topik penelitian. Studi kepustakaan bermaksud untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya teori yang akan menjadi landasan penelitian dan dapat menunjang data yang dikumpulkan.

3. Pendekatan Dokumentasi

Pendekatan dokumentasi yakni pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mencari sumber data atau dokumen yang dibutuhkan dalam menganalisis persoalan atau objek yang akan diteliti. Menurut (Sugiyono, 2015), sumber informasi bisa didapatkan peneliti dari jurnal, artikel, buku, data statistik, dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan menjalankan *software* WarpPLS 6.0. *Partial Least Square* (PLS) yakni anggota dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang adalah cara analisis dengan maksud mengestimasi model yang memanfaatkan variabel laten dengan *multiple indicator* (Ghozali, 2016:417).

3.6.1 Konseptual Model

Konseptual model terdiri atas model indikator reflektif dan model indikator formatif, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan model indikator reflektif. Model indikator reflektif dijalankan sebagaimana *classical test theory* dimana variasi skor dari variabel laten adalah fungsi dari *true score* ditambah *error* (Solimun & Fernandes, 2017).

3.6.2 Analisis Deskriptif

Analisis ataupun statistika deskriptif yakni analisis yang dimanfaatkan untuk menganalisa data dengan memaparkan (deskripsi) data yang sudah didapatkan dengan catatan tidak membentuk atau menghadirkan kesimpulan

yang berlaku umum (Sugiyono dalam Afifah 2019: 84). Maka, variabel laten memberi dampak variasi pengukuran dan opini keterkaitan kausalitas dari variabel laten ke indikator.

Penelitian yang terlaksana dengan populasi (tanpa menentukan sampel) sudah dipastikan akan menjadikan analisis deskriptif sebagai pilihan pertama dalam penelitiannya. Analisis ini bisa digunakan jika peneliti hanya mau menggambarkan data sampel tanpa membentuk kesimpulan untuk populasi dari sumbernya. Namun, jika peneliti mau membentuk kesimpulan yang dimanfaatkan untuk populasi, maka metode yang dapat dijalankan adalah statistik inferensial (Afifah: 2019).

Analisis deskriptif pada penelitian sebenarnya adalah proses transformasi data penelitian dengan bentuk tabulasi yang memudahkan pemahaman dan interpretasi. Tabulasi berbentuk tabel numerik dan grafik dengan menyediakan rangkuman, pengaturan atau perunutan data. Analisis ini biadanya dimanfaatkan untuk mendatangkan informasi atas ciri variabel penelitian yang utama dan data demografi responden apabila perlu. Ukuran yang digunakan disimbolkan dalam tendensi sentral (rata-rata, modus, median), frekuensi, disperse (deviasi standar dan varian), korelasi dan kofisien antar variabel. Ukuran ini tergantung pada tipe skala pengukuran construct yang dimanfaatkan dalam penelitian (Afifah: 2019).

Pada analisis deskriptif bisa digunakan untuk mencari tahu seberapa besar relasi antar variabel dengan analisis korelasi, melaksanakan pengiraan dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan antara rata-rata sampel

atau populasi. Namun perlu disadari dalam analisis korelasi, regresi, pun membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak harus dibuktikan pengaruhnya. Jadi secara teknis bisa dipahami bahwa analisis deskriptif tidak memerlukan uji signifikansi sebab peneliti tidak berekinginan untuk membuat generalisasi (Afifah: 2019).

3.6.3 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran atau *outer model* memaparkan mengenai relasi antara indikator dengan variabel laten (Ghozali, 2016). *Outer model* mendeskripsikan pengujian validitas dan reliabilitas dari indicator pada konstruk atau bariabelnya. Menurut Solimun dan Fernandes (2017:115), penilaian untuk uji validitas dilaksanakan dengan *convergent validity* dan *discriminant validity* dan uji reliabilitas diukur dengan *composite reliability* dan *alpha Cronbach*. Sedangkan untuk konstruk dengan model formatif dilakukan dengan dasar *substantive content* dan membandingkan signifikansi statistik dari nilai *estimasi weight*.

1. *Convergent validity*

Validitas konvergen bisa diperhatikan dari nilai koefisien korelasi antar indikator reflektif *score* dengan variabel laten *score* (Solimun & Fernandes, 2017:115). Dalam analisis faktor, validitas ini juga bisa ditintai melalui *loading factor* yang diasumsikan sudah memenuhi jika menunjukkan nilai $> 0,50$ (Ghozali, 2016).

2. *Discriminan validity*

Discriminan validity mencakup atas masing-masing indikator dan kuisisioner. *Discriminan validity* bagi indikator dinilai dari *cross loading* pada indikator terhadap setiap variabel laten. Jika nilai loading menyatakan lebih besar dari variabel lain, maka diasumsikan bahwa variabel berpotensi bisa memprediksi indikator yang lebih baik (Solimun & Fernandes, 2017:116).

3. *Composite reliability*

Composite reliability dimanfaatkan dalam menilai reliabilitas kuisisioner. Sebuah kuisisioner dianggap mempunyai *reliability* komposit yang baik jika nilainya $> 0,70$ (Solimun & Fernandes, 2017:116).

4. *Cronebach alpha*

Cronbach Alpha adalah besaran yang mudah digunakan untuk mendapatkan reliabilitas pada kuisisioner. Kuisisioner yang termasuk reliabel yakni jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Solimun & Fernandes, 2017:117).

3.6.4 Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model dipakai untuk menguji serta menjelaskan mengenai relasi konstruk laten yang satu dengan konstruk laten yang lain. *Inner model* dapat diukur dengan uji berikut:

a. Uji Kecocokan Model

Uji kecocokan model dipakai untuk mencari tahu sebuah model yang mempunyai kesamaan dengan data. Pengujian ini dilaksanakan sebelum

menguji signifikansi *path coefficient* dan R^2 . Ada tiga jenis pada uji kecocokan model, yaitu *Average Path Coefficient (APC)*, *Average R-Square (ARS)* dan *Average Variance Factor (AVIF)*.

Tabel 3.3
Kriteria Uji Kecocokan Model

Indikasi	Kriteria
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	$P < 0,05$
<i>Average R-Square (ARS)</i>	$P < 0,05$
<i>Average Variance Factor (AVIF)</i>	$AVIF < 5$

Pada tabel 3.3 disajikan hasil uji kecocokan model dengan tiga indikasi yaitu APC, ARS, dan AVIF.

Tabel 3.4
Uji Kecocokan Model

Indikasi	Kriteria	Hasil	Keterangan
APC	$P < 0,05$	0,315 ; $P = 0.002$	Terpenuhi
ARS	$P < 0,05$	0,404 ; $P < 0.001$	Terpenuhi
AVIF	< 5	1.051	Terpenuhi

Sumber : Hasil Uji WarpPLS

b. *Path Coefficient*

Nilai dari *path coefficient* dipakai untuk mencari tahu nilai koefisien jalur.

c. *R-square (R)*

Nilai dari R^2 ini dipakai untuk melihat pengaruh dari variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Semakin besar nilai R^2 , akan menunjukkan tingginya pengaruh antara variabel laten independen terhadap variabel laten dependen.

Tabel 3.5 pengukuran *R-Square*

Indikasi	Kriteria
Kuat	0,67
Menengah	0,33
Lemah	0,19

Pada tabel 3.5 disajikan hasil nilai dari *R-square* dalam penelitian ini.

Tabel 3.6 *Latent Variables Coefficient*

	KAPD	SPIP	PKD	GG
<i>R-square</i>				0.404
<i>Adj. R-square</i>				0.371
<i>Composit reliab.</i>	0.875	0.882	0.855	0.881
<i>Cronbach's alpha</i>	0.838	0.816	0.796	0.849
<i>Avg.var. extrac.</i>	0.440	0.657	0.497	0.427
<i>Full Collin. VIF</i>	1.780	1.448	1.335	1.166
<i>Q-Square</i>				0.440

Sumber : Hasil Uji WarpPLS

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk memprediksi besar variabel dependen menggunakan data variabel telah dijalankan sebelumnya (Ghozali, 2016). Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengambil keputusan atas asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis untuk penelitian ini diselenggarakan dengan memakai signifikansi 5%. Uji ini dipakai untuk mencari tahu eksistensi dari dampak variabel independent secara individual terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila $P \leq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, tidak terdapat pengaruh antara kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*.
- b. Apabila $P > 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, terdapat pengaruh antara kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Diskripsi Lokasi / Obyek Penelitian

4.1.1.1 Profil Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan

Inspektorat yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur pengawas pelaksanaan Pemerintah Daerah, yang berposisi dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah serta pemberian bimbingan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat sendiri dipimpin oleh seorang inspektur.

Inspektorat sendiri berada dibawah nanungan Bupati dengan dasar hukum yang berasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Inspektorat Kabupaten Lamongan memiliki wewenang pokok menyelenggarakan pengamatan terhadap penyelenggaraan persoalan pemerintah di daerah, penyelenggaraan bimbingan atas pemerintahan desa dan penyelenggaraan persoalan pemerintah desa.

Saat melaksanakan tugas utama seperti yang dijabarkan pada poin sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Lamongan memiliki wewenang antara

lain menyusun kebijakan teknik bidang pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang mencakup Pemerintahan, Organisasi, Keuangan, Peralatan, Perlengkapan dan BUMD; pelayanan pendukung pelaksanaan Pemerintah Daerah bidang pengawasan; Pembangunan, Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah serta Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan. (Peraturan Bupati Lamongan No 56 Tahun 2016).

4.1.1.2 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan

1. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan

Terealisasikannya pengawasan yang professional, unggul, dan bertanggung jawab serta sanggup menghadirkan dukungan yang mengarah pada pelaksanaan pemerintahan yang jujur dan akuntabel.

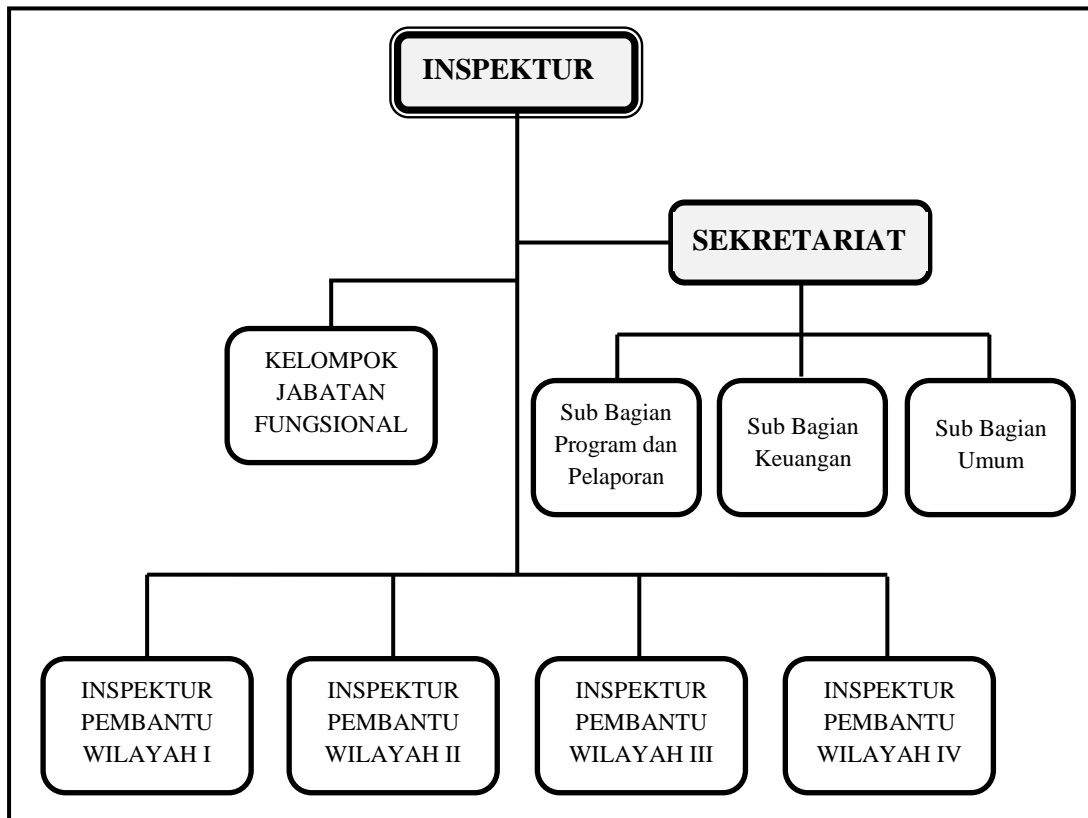
2. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan

- a. Mengoptimalkan kualitas aparat pengawasan;
- b. Memperkuat kesadaran aparatur pada peraturan undang-undang;
- c. Merealisasikan pengawasan yang baik sehingga akan meningkatkan kualitas dari pengawasan;
- d. Mempermudah perilaku pembenaran yang tepat dan cermat apabila didapati adanya penyimpangan.

4.1.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan

Gambar 4.1

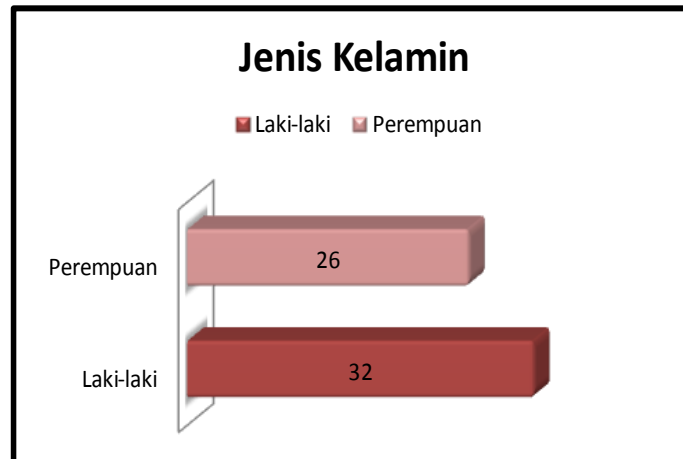
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan



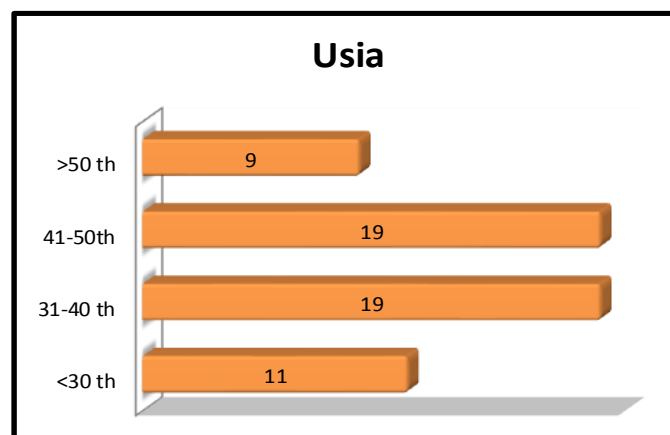
Sumber : Peraturan Bupati Lamongan No 56 Tahun 2016

4.1.2 Diskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan. Deskriptif responden ini merupakan identitas responden yang dilihat dari gender, usia, posisi/jabatan, pendidikan terakhir, latar pendidikan dan lama bekerja. Supaya menegaskan mengenai deskriptif responden dalam penelitian ini penulis membuatnya dalam bentuk tabel. Berikut adalah tabel karakteristik responden yang telah mengisi kuesioner :

Gambar 4.2**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan karakteristik responden dari jenis kelamin, laki-laki menjadi yang paling dominan di dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan yaitu dengan jumlah 32 pegawai atau sebanyak 55%. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 26 atau jika dalam bentuk persentase sebanyak 45%.

Gambar 4.3**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Berdasarkan gambar diagram usia diatas dapat diketahui adanya keragaman usia para responden. Diagram diatas menunjukkan jumlah usia kurang dari 30 tahun sebanyak 11 orang atau sebesar 19%. Sementara rentan usia 31-40 tahun adalah sebanyak 19 orang atau sebesar 33%. Dan pada rentan usia 41-50 tahun adalah sebesar 33% dan terakhir adalah usia lebih dari 50 tahun sebanyak 9 responden atau sebanyak 15%.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Posisi/Jabatan

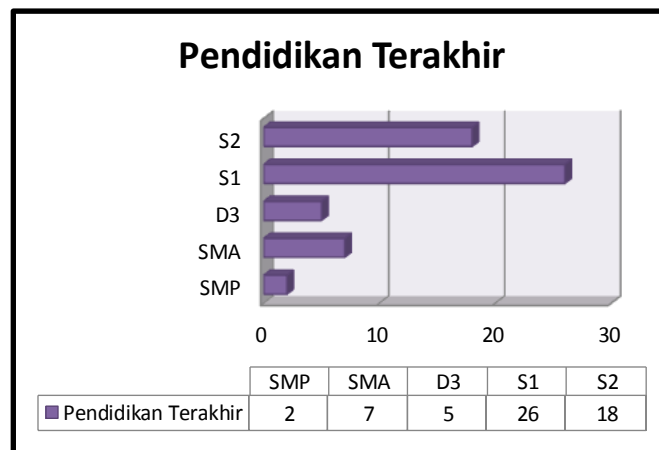
Posisi/Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
Inspektur	5	9
Sekretaris	1	2
Subbag Keuangan	1	2
Subbag Umum	1	2
Auditor Madya	7	12
Auditor Muda	9	15
Auditor Pertama	9	15
Staf Sekretariat	25	43

Dari tabel diatas karakteristik responden berdasarkan posisi/jabatan diatas menunjukkan bahwa jabatan staf sekretariat menduduki frekuensi terbanyak dengan jumlah 25 responden atau sebanyak 43%. Setelah itu disusul dengan jabatan auditor pertama dan auditor muda dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing 9 atau dengan persentase 15%. Sementara posisi auditor madya memiliki frekuensi 7 responden atau 12%. Dan selanjutnya posisi inspektur/inspektur pembantu wilayah sebanyak 5 responden atau 9%, lalu yang terakhir dengan nominal yang sama masing-

masing terdapat 1 responden yaitu jabatan sekretariat, subbag keuangan dan subbag umum dengan persentase 2%.

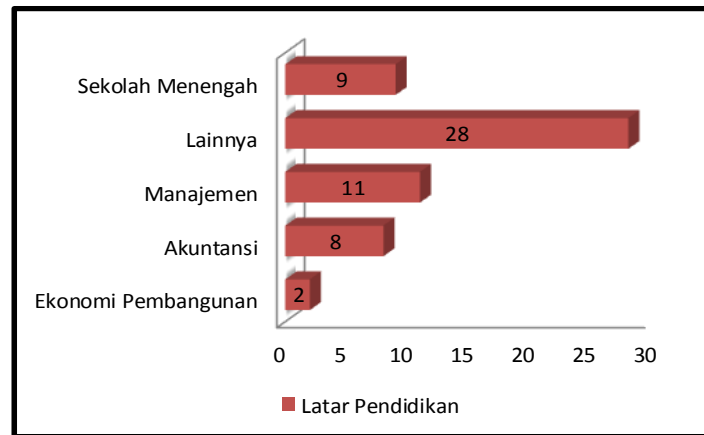
Gambar 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



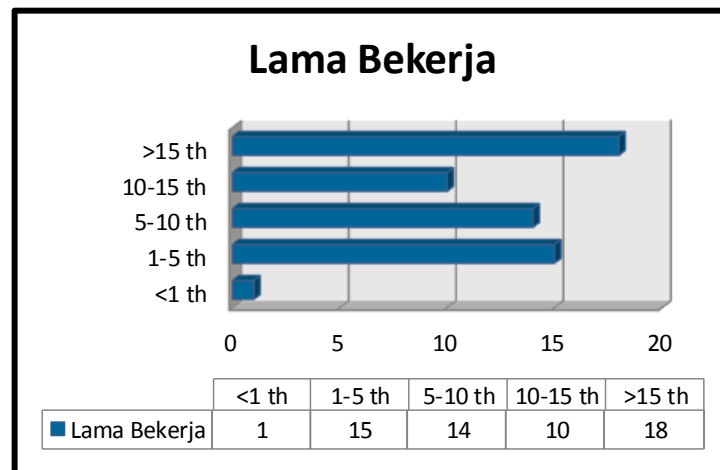
Dari gambar diagram diatas karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir diatas menunjukkan pendidikan terakhir dengan persentase paling rendah yaitu SMP yang berjumlah 2 responden atau sebanyak 3%. Sementara pendidikan terakhir SMA sebanyak 7 responden atau 12%. Sedangkan pendidikan terakhir D3 tercatat 5 responden atau 9%. Untuk pendidikan terakhir S1 memiliki persentase terbanyak dibandingkan dengan yang lainnya yaitu 45% atau 26 responden. Dan yang terakhir pendidikan terakhir S2 sebanyak 18 responden atau 31%.

Gambar 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Pendidikan



Karakteristik responden berdasarkan latar pendidikan diatas menunjukkan bahwa latar pendidikan ekonomi pembangunan berjumlah 2 responden atau 3%, sedangkan latar pendidikan akuntansi sebanyak 8 responden atau 14%, latar pendidikan manajemen berjumlah 11 responden atau 19%, sementara latar pendidikan dari bidang lainnya memiliki persentasi yang paling banyak yaitu 28 responden atau 48%, dan latar pendidikan yang terakhir yaitu dari Sekolah Menengah yang berjumlah 9 responden atau 16%.

Gambar 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja



Karakteristik responden berdasarkan latar pendidikan diatas menunjukkan bahwa responden dengan lama bekerja kurang dari 1 tahun adalah 1 responden atau 2%. Sementara dalam rentan 1-5 tahun lamanya bekerja berjumlah 15 responden atau 26%. Selanjutnya dalam rentan 5-10 tahun terdapat 14 responden atau 24%. Sedangkan lama bekerja entan 10-15 tahun berjumlah 10 responden atau 17%. Dan yang terakhir lama bekerja lebih dari 15 tahun tercatat 18 responden atau 31%.

4.1.3 Diskripsi Variabel Penelitian

Tabel 4.2

Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS(5)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X1.1	0	0	0	0	9	15,5	43	74,1	6	10,3	58	100
2	X1.2	0	0	0	0	1	1,7	37	63,7	20	34,4	58	100
3	X1.3	0	0	0	0	7	12	44	75,8	7	12	58	100
4	X1.4	0	0	0	0	7	12	41	70,7	10	17,2	58	100
5	X1.5	0	0	0	0	2	3,4	40	68,9	16	27,5	58	100
6	X1.6	0	0	0	0	4	6,8	39	67,2	15	25,8	58	100
7	X1.7	0	0	0	0	8	13,8	39	67,2	11	18	58	100
8	X1.8	0	0	0	0	7	12	36	62	15	25,8	58	100
9	X1.9	0	0	0	0	5	8,6	41	70,7	12	20,6	58	100

Sumber : data primer yang sudah diolah

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa untuk indikator kinerja masukan/*input* (X1.1) paling banyak menjawab setuju yaitu sebanyak 43 responden atau sebesar 74,1%. Yang menjawab kurang setuju sebanyak 9 responden atau sebesar 15,5% sedangkan untuk pernyataan sangat setuju sebanyak 6 responden atau sebesar 10,3%. Pada (X1.2) yang menyatakan kurang setuju hanya terdapat 1 responden atau sebesar 1,7%, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 37 responden atau sebanyak 63,7% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 responden atau

sebesar 34,4%. Lalu pada indikator proses/*process* (X1.3) terdapat 44 responden yang menjawab setuju atau sebesar 75,8%, sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 responden atau sebesar 12% yang mana sama dengan responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 7 responden atau 12%. Pada (X1.4) paling banyak menjawab setuju dengan 41 responden atau 70,7%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden atau sebanyak 17,2% sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 responden atau sebanyak 12%. Lalu pada (X1.5) yang menjawab kurang setuju sebanyak 2 responden atau sebesar 3,4%, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 responden atau sebesar 27,5% sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 40 responden atau sebesar 68,9%. Indikator selanjutnya adalah indikator keluaran/*output* (X1.6) yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 responden atau sebesar 6,8%, yang menjawab setuju sebanyak 39 responden atau sebanyak 67,2% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden atau 25,8%. Selanjutnya indikator hasil/*outcome* (X1.7) yang menjawab kurang setuju sebanyak 8 responden atau sebesar 13,8%, yang menjawab setuju sebanyak 39 responden atau sebanyak 67,2% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden atau 18%. Pada indikator selanjutnya atau yang terakhir yaitu indikator dampak/*impact* (X1.8) yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 responden atau sebesar 12%, yang menjawab setuju sebanyak 36 responden atau sebanyak 62% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden atau 25,8%. Pada (X1.9) yang menjawab kurang setuju sebanyak 5

responden atau sebesar 8,6%, yang menjawab setuju sebanyak 36 responden atau sebanyak 62% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 responden atau 20,6%.

Tabel 4.3

Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS(5)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X2.1	0	0	1	1,7	7	12	41	70,7	8	13,8	58	100
2	X2.2	0	0	2	3,4	10	17,2	40	68,9	6	10,3	58	100
3	X2.3	0	0	1	1,7	12	20,6	34	58,6	11	18,9	58	100
4	X2.4	0	0	0	0	9	15,5	42	72,4	7	12	58	100

Sumber : data primer yang sudah diolah

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa untuk indikator lingkungan pengendalian (X2.1) paling banyak menjawab setuju yaitu sebanyak 41 responden atau sebesar 70,7%. Yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 responden atau sebesar 12%, sedangkan untuk pernyataan sangat setuju sebanyak 8 responden atau sebesar 13,8% namun terdapat 1 responden yang menjawab tidak setuju atau setara dengan 1,7%. Pada (X2.2) yang menyatakan tidak setuju terdapat 2 responden atau sebesar 3,4 %, sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 10 responden atau sebanyak 17,2%, yang menjawab setuju sebanyak 40 responden atau sebesar 68,9% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 6 responden atau 10,3%.

Lalu pada (X2.3) terdapat 1 responden yang menjawab tidak setuju atau sebesar 1,7%, sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 12 responden atau sebesar 20,6%, dan yang menjawab setuju dengan persentase 58,6% sebanyak 34 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden atau sebanyak 18,9%. Lalu pada indikator penilaian resiko (X2.4) yang menjawab kurang setuju dengan 9 responden atau 15,5%, yang menjawab setuju dengan persentase terbanyak yaitu 72,4% atau sebanyak 42, sedangkan yang menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 7 responden atau 12%.

Tabel 4.4

Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS(5)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X3.1	0	0	0	0	2	3,4	44	75,8	12	20,6	58	100
2	X3.2	0	0	0	0	2	3,4	47	81	9	15,5	58	100
3	X3.3	0	0	0	0	2	3,4	45	77,5	11	18,9	58	100
4	X3.4	0	0	0	0	3	5,1	41	70,7	14	24,1	58	100
5	X3.5	0	0	0	0	0	0	47	81	11	18,9	58	100
6	X3.6	0	0	0	0	3	5,1	48	82,7	7	12	58	100

Sumber : data primer yang sudah diolah

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa untuk indikator akuntabilitas (X3.1) paling banyak menjawab setuju yaitu sebanyak 44

responden atau sebesar 75,8%. Yang menjawab kurang setuju sebanyak 2 responden atau sebesar 3,4% sedangkan untuk pernyataan sangat setuju sebanyak 12 responden atau sebesar 20,6%. Pada (X3.2) yang menyatakan kurang setuju terdapat 2 responden atau sebesar 3,4%, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 47 responden atau sebanyak 81% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden atau sebesar 15,5%. Pada (X3.3) terdapat 2 responden yang menjawab kurang setuju atau sebesar 3,4%, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 45 responden atau sebesar 77,5%, yang menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 11 responden atau 18,9%. Lalu indikator selanjutnya yaitu *value for money* (X3.4) paling banyak menjawab setuju dengan 41 responden atau 70,7%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 responden atau sebanyak 24,1% sedangkan yang menjawab cukup setuju sebanyak 3 responden atau sebanyak 5,1%. Lalu pada (X3.5) yang menjawab yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden atau sebesar 18,9% sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 47 responden atau sebesar 81%. Indikator pengendalian (X3.6) yang menjawab kurang setuju sebanyak 3 responden atau sebesar 5,1%, yang menjawab setuju sebanyak 48 responden atau sebanyak 82,7% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden atau 12%.

Tabel 4.5
Variabel Penerapan *Good Governance*

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		STS (1)		TS (2)		CS (3)		S (4)		SS(5)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Y.1	0	0	0	0	3	5,1	42	72,4	13	22,4	58	100
2	Y.2	0	0	0	0	4	6,8	40	68,9	14	24,1	58	100
3	Y.3	0	0	2	3,4	7	12	41	70,7	8	13,8	58	100
4	Y.4	0	0	0	0	4	6,8	45	77,5	9	15,5	58	100
5	Y.5	0	0	2	3,4	9	15,5	38	65,5	9	15,5	58	100
6	Y.6	0	0	0	0	6	10,3	45	77,5	7	12	58	100
7	Y.7	0	0	0	0	4	6,8	43	74,1	11	18,9	58	100
8	Y.8	0	0	0	0	3	5,1	48	82,7	7	12	58	100
9	Y.9	0	0	0	0	0	0	47	81	11	18,9	58	100
10	Y.10	0	0	0	0	1	1,7	48	82,7	9	15,5	58	100

Sumber : data primer yang sudah diolah

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa untuk indikator *transparency* (Y.1) paling banyak menjawab setuju yaitu sebanyak 42 responden atau sebesar 72,4%, yang menjawab cukup setuju sebanyak 3 responden atau sebesar 5,1% sedangkan untuk pernyataan sangat setuju sebanyak 13 responden atau sebesar 22,4%. Pada (Y.2) yang menyatakan cukup setuju terdapat 4 responden atau sebesar 6,8%, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 40 responden atau sebanyak 68,9% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 responden atau sebesar 24,1%. Pada

indikator *responsiveness* (Y.3) terdapat 2 responden yang menjawab tidak setuju atau sebesar 3,4%, sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 responden atau sebesar 12%, yang menjawab setuju yaitu sebanyak 41 responden atau 70,7% dan yang menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 8 responden atau sebesar 13,8%. Pada pernyataan (Y.4) paling banyak menjawab setuju yaitu 45 responden atau 77,5%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden atau sebanyak 15,5% sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 responden atau sebanyak 6,8%. Lalu pada indikator *consensus orientation* (Y.5) yang menjawab kurang setuju sebanyak 9 responden atau sebesar 15,5% sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 38 responden atau sebesar 65,5% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden atau sebesar 15,5% namun terdapat responden yang menjawab tidak setuju yaitu sebanyak 2 responden atau sebesar 3,4%. Indikator *equity* (Y.6) yang menjawab kurang setuju sebanyak 6 responden atau sebesar 10,3%, yang menjawab setuju sebanyak 45 responden atau sebanyak 77,5% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden atau 12%. Indikator *effectiveness and efficiency* (Y.7) yang menjawab kurang setuju sebanyak 6 responden atau sebesar 10,3%, yang menjawab setuju sebanyak 45 responden atau sebanyak 77,5% dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden atau 12%.

4.1.4 Hasil Analisis Data

4.1.4.1 Analisis Deskriptif

Table 4.6
Hasil Output Uji Deskriptif

Variabel	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Skewness</i>	<i>Exc. Kurtosis</i>
X1	-2,266	2,466	0,267	0,113
X2	-3,464	2,117	-0,749	1,524
X3	-2,107	2,735	0,919	0,880
Y	-2,330	2,848	0,809	1,140

Sumber: Data primer yang dikelola

Hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X1)

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah memiliki lima indikator yaitu indikator masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak. Dari kelima indikator tersebut nilai rata-rata *Min* nya yaitu -2,266, nilai *Max* yaitu 2,466, nilai *Skewness* yaitu 0,267 dan nilai *Exc. Kuortosis* yaitu 0,113.

2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki 2 indikator yaitu indikator lingkungan pengendalian dan penilaian resiko. Kedua indikator tersebut nilai rata-rata *Min* sebesar -3,464, nilai *Max* sebesar 2,117, nilai *Skewness* yaitu -0,749 dan nilai *Exc. Kuortosis* 1,524.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)

Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki 3 indikator yaitu akuntabilitas, *value for money* dan pengendalian. Dari ketiga indikator tersebut nilai

rata-rata *Min* yaitu -2,107, nilai *Max* yaitu 2,735, nilai *Skewness* yaitu 0,919 dan nilai *Exc. Kurtosis* sebesar 0,880.

4. Penerapan *Good Governance* (Y)

Penerapan *Good Governance* memiliki 7 indikator yaitu *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectifeness & efficiency, accountability, strategy vision*. Dari ketujuh indikator tersebut nilai rata-rata *Min* sebesar -2,330, nilai *Max* sebesar 2,848, nilai *Skewness* sebesar 0,809 dan nilai *Exc. Kurtosis* sebesar 1,140.

4.1.4.2 Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji model pengukuran menjelaskan mengenai hubungan antara indikator dengan konstruk. Uji ini digunakan untuk menguji instrument penelitian. Uji instrument dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ada 4 konstruk yaitu Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Terhadap Penerapan *Good Governance*. Empat konstruk tersebut masuk dalam indikator reflektif. Indikator reflektif dalam penelitian ini adalah Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Terhadap Penerapan *Good Governance*. Sedangkan indikator reflektif adalah hubungan kausalitas yang mengarah dari indikator menuju konstruk.

1. *Convergent validity*

Validitas konvergen diukur dari hasil *loading factor*. Indikator akan dinyatakan benar jika memperoleh nilai *loading factor* $\geq 0,5$ dan

apabila nilai *loading factor* $\leq 0,5$ dinyatakan tidak mampu atau gugur. Tabel 4.6 menyajikan hasil uji *convergent validity* dari model penelitian dengan melihat nilai *loading factor*-nya.

Table 4.7
Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Kriteria	<i>Loading Factor</i>	Keterangan
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	KAPD 1	$\geq 0,5$	0,522	Terpenuhi
	KAPD 2	$\geq 0,5$	0,563	Terpenuhi
	KAPD 3	$\geq 0,5$	0,658	Terpenuhi
	KAPD 4	$\geq 0,5$	0,707	Terpenuhi
	KAPD 5	$\geq 0,5$	0,695	Terpenuhi
	KAPD6	$\geq 0,5$	0,709	Terpenuhi
	KAPD 7	$\geq 0,5$	0,765	Terpenuhi
	KAPD 8	$\geq 0,5$	0,605	Terpenuhi
	KAPD 9	$\geq 0,5$	0,709	Terpenuhi
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	SPIP 1	$\geq 0,5$	0,884	Terpenuhi
	SPIP 2	$\geq 0,5$	0,821	Terpenuhi
	SPIP 3	$\geq 0,5$	0,918	Terpenuhi
	SPIP 4	$\geq 0,5$	0,576	Terpenuhi
Pengelolaan Keuangan Daerah	PKD 1	$\geq 0,5$	0,786	Terpenuhi
	PKD 2	$\geq 0,5$	0,697	Terpenuhi
	PKD 3	$\geq 0,5$	0,678	Terpenuhi
	PKD 4	$\geq 0,5$	0,673	Terpenuhi
	PKD 5	$\geq 0,5$	0,752	Terpenuhi
	PKD 6	$\geq 0,5$	0,634	Terpenuhi
Penerapan <i>Good Governance</i>	GG 1	$\geq 0,5$	0,673	Terpenuhi
	GG 2	$\geq 0,5$	0,601	Terpenuhi

	GG 3	$\geq 0,5$	0,703	Terpenuhi
	GG 4	$\geq 0,5$	0,603	Terpenuhi
	GG 5	$\geq 0,5$	0,704	Terpenuhi
	GG 6	$\geq 0,5$	0,782	Terpenuhi
	GG 7	$\geq 0,5$	0,584	Terpenuhi
	GG 8	$\geq 0,5$	0,601	Terpenuhi
	GG 9	$\geq 0,5$	0,678	Terpenuhi
	GG 10	$\geq 0,5$	0,577	Terpenuhi

Sumber : Hasil olah data program WarpPls 6.0

Sebagaimana hasil pengujian pada tabel 4.7 menampilkan bahwa setiap variabel punya nilai *loading factor* di atas 0,5. Dengan demikian indikator variabel mempunyai *loading factor* lebih besar dari 0,5 sudah sesuai kualifikasi *convergent validity*. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam tiap-tiap variabel di penelitian ini yaitu kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, penerapan *good governance* telah memenuhi *convergent validity* atau dikatakan valid.

2. *Discriminant validity*

Discriminant validity bisa diperhatikan dari hasil *cross loading* dari masing-masing indikator dengan konstruknya. Sedangkan *discriminant validity* untuk kuesioner bisa ditinjau dengan perbandingan nilai *square root of Avarage Variance Extracted (AVE)*. Pada tabel 4.8 dijelaskan hasil uji *discriminant validity* dari model penelitian dengan melihat nilai *cross loading*-nya dan nilai AVE.

Tabel 4.8
Cross Loading dan AVE

	KAPD	SPIP	PKD	GG	AVE
KAPD 1	(0,522)	0,327	-0,442	-0,069	0,664
KAPD 2	(0,563)	-0,309	-0,049	0,094	
KAPD 3	(0,658)	0,091	-0,382	0,259	
KAPD 4	(0,707)	0,376	0,169	-0,064	
KAPD 5	(0,695)	-0,069	0,278	0,142	
KAPD 6	(0,709)	-0,134	0,042	-0,221	
KAPD 7	(0,765)	-0,118	-0,210	-0,011	
KAPD 8	(0,605)	-0,237	0,210	0,052	
KAPD 9	(0,709)	0,076	0,283	-0,152	
SPIP 1	-0,044	(0,884)	0,116	-0,145	0,811
SPIP 2	0,015	(0,821)	-0,178	0,057	
SPIP 3	0,011	(0,918)	0,091	-0,122	
SPIP 3	0,029	(0,576)	-0,070	0,336	
PKD 1	-0,020	-0,059	(0,786)	0,011	0,705
PKD 2	-0,067	-0,030	(0,697)	0,047	
PKD 3	-0,126	-0,121	(0,678)	0,276	
PKD 4	0,178	-0,029	(0,673)	-0,195	
PKD 5	0,050	-0,044	(0,752)	-0,185	
PKD 6	-0,015	0,317	(0,634)	0,065	
GG 1	-0,027	-0,393	0,129	(0,673)	0,654
GG 2	0,098	-0,037	0,445	(0,601)	
GG 3	-0,302	0,362	-0,065	(0,703)	
GG 4	-0,088	0,113	-0,108	(0,603)	
GG 5	-0,350	0,216	0,090	0,704	
GG 6	-0,031	-0,016	-0,070	0,782	
GG 7	-0,215	0,296	0,081	0,584	
GG 8	0,517	-0,265	-0,266	0,601	
GG 9	0,211	-0,159	-0,055	0,678	
GG 10	0,288	-0,141	-0,178	0,577	

Sumber : Hasil olah data program WarpPls 6.0

Uji validitas untuk indikator ini memanfaatkan hubungan skor indikator dengan skor konstraknya. Pengukuran dengan indikator reflektif dilakukan dengan melihat nilai korelasi dan nilai *square root of Avarage Variance Extracted* (AVE). Pada tabel 4.8 menunjukkan

bahwa nilai korelasi *cross loading* terhadap konstruksya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi indikator terhadap konstruk lainnya. Selain itu, hasil *square root of Avarage Variance Extracted* (AVE) masing-masing variabel lebih dari 0,50. Sebagaimana pemaparan tersebut, didapatkan intik bahwa seluruh indikator dalam penelitian dinyatakan benar.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipakai untuk mengukur atau mencari tahu tingkat kestabilan suatu alat ukur (kuesioner). Dalam penelitian ini terdapat satu indikator yaitu indikator relektif.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji *composite reliability* dan *cronbach alpha*. Pada tabel 4.8 disajikan hasil uji reliabilitas.

Tabel 4.9

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	0,875	0,838	Reliable
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,882	0,816	Reliable
Pengelolaan keuangan daerah	0,855	0,796	Reliable
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,881	0,849	Reliable

Sumber : Hasil olah data program WarpPls 6.0

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, *Composite reliability* menunjukkan hasil diatas 0,70 dan *Cronbach alpha* menghasilkan nilai yang memuaskan yaitu diatas 0,60. Berdasarkan nilai pada hasil menampilkan bahwa konsistensi dan stabilitasi kuesioner yang dipakai dalam kategori tinggi. Sehingga bisa dinyatakan bahwa kuesioner dapat dikatakan reliable atau memiliki reabilitas yang baik.

4.1.4.3 Model Struktural (*Inner Model*)

Langkah berikutnya yakni menjalankan evaluasi structural (*inner model*) yang mencakup uji kecocokan model (*model fit*), *path coefficient*, dan R^2 . Dalam uji kecocokan model ada 3 indeks pengujian yakni *average path coefficient* (APC), *average R-Squared* (ARS) dan *average varians factor* (AVIF) dengan kriteria APC dan ARS diterima dengan syarat *p-value* < 0,05 dan AVIF lebih kecil dari 5.

Gambar 4.7
Model Fit And Quality Indices

Model Fit And Quality Indices
Average path coefficient (APC) = 0,315, P=0,002
Average R-squared (ARS) = 0,404, P<0,001
Average block VIF (AVIF) = 1,051, acceptable if <= 5, ideally <= 3,3

Sumber : Hasil olah data program WarpPls 6.0

Berikut ini adalah hasil output model *fit indices* yang disajikan dalam tabel yaitu:

Tabel 4.10
Model Fit Indices

	Indeks	P-Value	Kriteria	Keterangan
APC	0,315	<0,002	P <0,05	Diterima
ARS	0,404	<0,001	P <0,05	Diterima
AVIF	1,051 <i>acceptable if <=</i> 5		AVIF <5	Diterima

Sumber : Hasil olah data program WarpPls 6.0

Hasil tabel diatas, memaparkan bahwa APC mempunyai indeks sebesar 0,315 dengan nilai *P-value* < 0,002. Sedangkan ARS memiliki indeks sebesar 0,404 dengan nilai *P-value* < 0,001. Sebagaimana kriteria, APC dinyatakan telah mencukupi kriteria sebab mempunyai nilai $P < 0,002$. Sama halnya pada nilai *P-value* dari ARS yaitu $P < 0,001 < 0,05$. Nilai AVIF yang harus <5 telah tercukupi sebab sebagaimana data tersebut AVIF nilainya 1,051. Dengan demikian maka *inner model* dapat terpenuhi.

4.1.4.4 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis mempunyai tujuan untuk membuktikan kevalidan dari dugaan peneltian. Hasil hubungan konstruk yang dinilai dengan memperhatikan *path coefficients* dan tingkat siginifikannya yang nantinya bisa dibandingkan dengan dugaan penelitian di bab kedua. Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini yakni sebesar 5%. Berikut

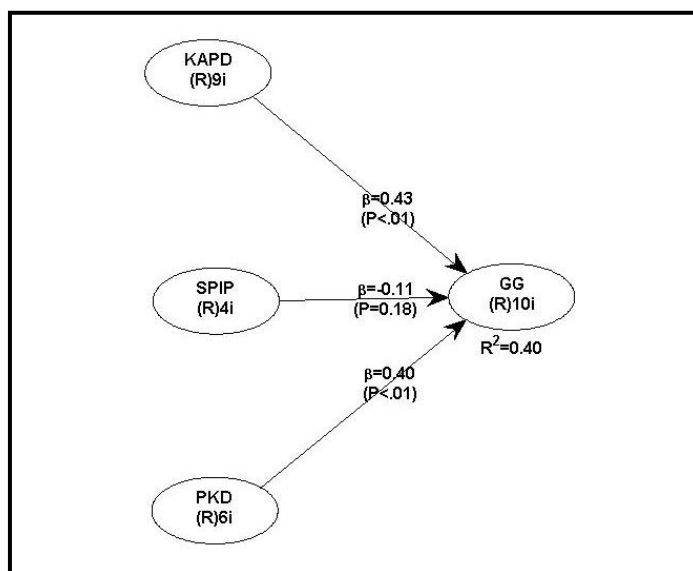
adalah hipotesis yang bertujuan untuk membuktikan kevalidan atas dugaan, terdapat 4 hipotesis yakni:

1. Hipotesis pertama : Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.
2. Hipotesis kedua : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.
3. Hipotesis ketiga : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.
4. Hipotesis keempat : Kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Berikut ini merupakan gambar model penelitian dan hasil dari *effect size* yang telah diperoleh berdasarkan pengolahan data :

Gambar 4.8

Model Penelitian



Sumber : Hasil olah data program WarpPls 6.0

Keterangan :

KAPD = Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

PKD = Pengelolaan Keuangan Daerah

GG = Penerapan *Good Governance*

Dalam gambar tersebut bisa dilihat bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki *P-Value* <0,010 yang berarti bahwa *P-Value* kurang dari 0,05. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah memberi pengaruh pada implementasi *good governance*. Dapat dilihat dari nilai beta variabel kinerja aparatur pemerintah daerah sebesar β 0,43. Sedangkan untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap penerapan *good governance* dibuktikan dengan nilai *P-Value*=0,001. Dapat dilihat dari nilai beta variabel kinerja aparatur pemerintah daerah sebesar β 0,11. Lalu untuk variabel pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *good governance* dengan nilai *P-Value*<0,001. Hal ini dapat dilihat dari nilai beta variabel pendapatan sebesar β 0,40.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Indirect dan Total Effect

Kriteria	Variabel	KAPD	SPIP	PKD	GG
<i>Path Coefficients</i>	KAPD				
	SPIP				
	PKD				
	GG	0,435	-0,115	0,395	
<i>P-Values</i>	KAPD				
	SPIP				
	PKD				
	GG	<0,001	0,183	<0,001	

Sumber : Hasil olah data program WarpPls 6.0

Berikut ini, pengujian hipotesis diuraikan lebih lanjut :

1. Uji hipotesis 1

a. Hipotesis

H_0 : Kinerja aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

H_a : Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

b. Dasar pengambilan keputusan

$P\text{-Value} > 0,05$, maka H_0 diterima.

$P\text{-Value} < 0,05$, maka H_a diterima.

c. Hasil

$P\text{-Value} = 0,001$, artinya kurang dari 0,05. Maka H_a diterima atau H_0 tidak dapat dikung.

d. Kesimpulan

Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini dilihat dari hasil variabel kinerja aparatur pemerintah daerah yang memiliki $P\text{-Value}$ yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001.

2. Uji hipotesis 2

a. Hipotesis

H_0 : Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

H_a : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

b. Dasar pengambilan keputusan

$P\text{-Value} > 0,05$, maka H_0 diterima.

$P\text{-Value} < 0,05$, maka H_a diterima.

c. Hasil

$P\text{-Value} = 0,183$, artinya lebih dari 0,05. Maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat dikung.

d. Kesimpulan

Variabel sistem pengendalian internal pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini dilihat dari hasil variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang memiliki $P\text{-Value}=0,183$ yang berarti bahwa $P\text{-Value}$ lebih dari 0,05.

3. Uji hipotesis 3

a. Hipotesis

H_0 : Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

H_a : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

b. Dasar pengambilan keputusan

$P\text{-Value} > 0,05$, maka H_0 diterima.

$P\text{-Value} < 0,05$, maka H_a diterima.

c. Hasil

$P\text{-Value} = 0,001$, artinya kurang dari 0,05. Maka H_a diterima atau H_0 tidak dapat dikung.

d. Kesimpulan

Variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini dilihat dari hasil variabel pengelolaan keuangan daerah yang memiliki $P\text{-Value}$ yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001.

4. Uji hipotesis 4

a. Hipotesis

H₀ : kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerapan *good governance*.

H_a : kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerapan *good governance*.

b. Kesimpulan

Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan *good governance*. Dapat dilihat dari hasil diatas diperoleh nilai R², dimana nilainya sebesar 0,40 berarti bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah tidak mampu menjelaskan variabel penerapan *good governance*.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan hasil dan menguji pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah pada

implementasi *good governance*. Berdasarkan hasil dari penelitian uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ada variabel yang tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance* yaitu variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan variabel lainnya berpengaruh.

4.2.1 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance* pada Inspektorat Kabupaten Lamongan

Dalam menjalankan tugasnya menjadi aparat pengawas di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan berupaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan penyelenggaraan organisasi yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban secara periodik.

Penyelenggaran pemerintah yang baik (*good governance*), yakni setiap program pemerintah yang membangun harus dinilai sebagaimana tingkat pencapaiannya. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berlandaskan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Sebagai langkah untuk memaksimalkan akuntabilitas kerja, Inspektorat mengambil langkah yakni mereview setiap indikator pencapaian kerja yang utama, dengan mempertimbangkan capaian kerja, persoalan dan

masalah-masalah strategis yang membawa pengaruh terhadap penentu sebuah kesuksesan organisasi.

Tabel 4.12

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Persentasi OPD yang tidak terdapat temuan material/keuangan	86%	93,85%	109,07%
	Opini pemeriksa eksternal	WDP	WTP	WTP
	Nilai maturitas SPIP Kabupaten	3	3	100
	Persentasi tindaklanjut rekomendasi APIP selesai	83%	98%	118%
	Persentase laporan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
	Persentase PD dengan kategori nilai evaluasi SAKIP minimal B	80%	100%	125%
	Persentase tindak lanjut BPK selesai	70%	87,25%	124,6%
	Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/berkembang	4	20	500%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Lamongan 2019

Dalam data yang disajikan tabel tersebut bisa diperhatikan bahwa pencapaian kinerja dari Inspektorat Kabupaten Lamongan di antaranya:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi APIP selesai, indikator ini menunjukkan pencapaian dalam kategori sangat berhasil yakni 83%

dengan pencapaian kerja 118%. Indikator ini didukung oleh enam kegiatan. Kesuksesan indikator ini disebabkan kontribusi juga objek pengawasan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik melalui surat permintaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, maupun surat panggilan langsung kepada obyek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang diproses lebih lanjut berhasil didapatkan pada kategori sangat berhasil dengan pewujudan 100% target. Indikator ini didorong sebuah program dan juga disebabkan pemaksimalan atas tugas APIP Ketika menyelesaikan keluhan masyarakat yang masuk ke Inspektor Kabupaten Lamongan ataupun arahan dari Bupati Lamongan. Inspektorat Kabupaten Lamongan mengatasi keluhan dari masyarakat sebagai langkah dari merealisasikan pemerintahan yang baik dan bersih. Pengaduan atau keluhan masyarakat yang masuk dan telah diproses atau diperiksa lebih lanjut serta penanganan dengan total 24 dumas dari target 25 dumas, dengan rincian
 - Yang masuk Inspektorat sebanyak 8 dumas.
 - Yang masuk melalui lapor SP4 N sebanyak 7 dumas.
 - Pelimpahan dari Kepolisian sebanyak 4 dumas.
 - Pelimpahan dari Kejaksaan sebanyak 2 dumas
 - Pelimpahan dari Inspektorat Provinsi sebanyak 1 dumas.

- Pelimpahan dari Irjen Depdagri sebanyak 2 dumas.

Program atau acara yang diselenggarakan sebagai pendorong indikator ini yakni program Koordinasi dan Monitoring mencakup sosialisasi dan tindakan mencegah mengenai pelaksanaan aturan dan percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Lamongan, yang beraliansi dengan Polres Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan, Pelaksanaan Sapu Bersih Pungli dan Verifikasi LHKASN.

3. Persentase PD pada kategori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B. Indikator ini diperoleh kategori sangat berhasil yakni 100% dari target 80% dengancapaian yakni 125%. Kesanggupan dalam memperoleh indikator ini disebabkan peran serta kepala PD yang mengoptimalkan kinerjanya.
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK selesai dengan pencapaian kategori sangat berhasil dengan realisasi 87,25% dari target 70%, sehingga capaian kinerja 124,6%. Kesuksesan pencapaian ini didukung dengan perancangan yang siap dan jelas dalam membuat rencana kinerja dan memaksimalkan tim Tindak Lanjut rekomendasi BPK untuk berkontribusi dengan orbik yang terkait sehingganya kinerja BPK dapat dirampungkan sebagaimana target yang diperkirakan.
5. Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/berkembang, indikator ini tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu 20 PD dari target 4 PD dengan capaian kinerja 500%. Indikator ini difaktori oleh satu program yakni kegiatan pendampingan dari auditor kepada OPD.

Dari data tersebut tergambar jika sasaran indikator kinerja utama, seluruh indikator terpenuhi sebagaimana target yang ditentukan yang sampai pada prosentase 100% dalam kategori AA (memuaskan). Dalam hal ini, kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Lamongan sudah beroperasi sebagaimana perkiraan yang ditentukan dan sudah termasuk dalam kategori baik dan memuaskan.

4.2.2 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*

Kinerja aparatur pemerintah daerah terdiri dari 5 indikator yaitu indikator masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak. Dalam proses pengolahan data dilakukan penghapusan satu indikator yaitu indikator manfaat dan beberapa pertanyaan dari beberapa indikator yang dihapus sebab tidak mencukupi standar kriteria *convergent validity*.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk variabel kinerja aparatur pemerintah daerah menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* di Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan, dengan demikian (H1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Dhiyavani (2017), dan Mailoor Jefri Herbert (2017) yang menyatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Apabila implementasi *good governance* membutuhkan pencapaian kerja aparatur yang baik, kondusif, responsive dan mudah menyesuaikan yang nantinya membuahkan hasil yakni karakter

pemerintahan yang baik. Namun hal ini tidak cocok dengan penelitian Ghina Adha Haura dkk (2019) yang hasilnya memaparkan jika kinerja aparatur pemerintah daerah tidak membawa dampak signifikan terhadap *good governance*.

Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kinerja aparatur pemerintah daerah maka akan mempengaruhi terhadap penerapan *good governance*. Kriteria keberhasilan dalam sebuah organisasi atau individu ditandai dengan adanya tujuantujuan atau target yang akan dicapai, tanpa adanya suatu tujuan atau target maka tidak ada tolok ukur untuk mencapai kinerja yang baik dan bagus. Salah satu cara menilai keberhasilan suatu kinerja adalah dengan mencatat kegagalan dalam suatu aktivitas organisasi agar dapat diukur dan dievaluasi kemudian diperbaiki.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan atau target yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja dan prestasi serta ketepatan waktu dan minimnya kesalahan dapat mempengaruhi penerapan *good governance*.

4.2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari 2 indikator yaitu indikator lingkungan pengendalian dan penilaian resiko. Pada jalannya pengolahan data diambil tindakan pengurangan tiga indikator yakni indikator kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan serta

terdapat beberapa pertanyaan dari indikator yang dihapus sebab tidak mencukupi standar kriteria *convergent validity*.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah (H2) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* di Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan, dengan demikian (H3) ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Dhiyayani (2017) dimana hasilnya menunjukkan sistem pengendalian internal tidak memberi pengaruh pada implementasi *good governance*. Hal ini menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan masih tidak mencukupi sistem pengendalian internal yang tersedia sehingga tidak membawa pengaruh pada implementasi *good governance*. Apabila sistem pengendalian internal tidak mencukupi maka dapat dipastikan bahwa *good governance* tidak akan terealisasi.

Good governance pada saat ini belum terlaksana dengan baik, masih ditemukan persoalan yang menjadikan penerapan *good governance* tidak terselenggara dengan baik hal ini karena kurang kuarnya siste pengendalian internal pemerintah, dan peristiwa semacam ini hamper terjadi di semua sektor pemerintahan. Hal ini memungkinkan internal yang belum sepenuhnya terpenuhi atau terlaksana dengan baik. nan disebabkan karena terdapat beberapa indikator sistem pengendalian.

4.2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 3 indikator yaitu indikator akuntabilitas, *value for money* dan pengendalian. Pada tahap pengelolaan data dijalankan penghapusan dua indikator yakni indikator kejujuran dalam mengelola keuangan (*probity*) dan transparansi serta terdapat beberapa pertanyaan dari indikator yang dihapus sebab tidak sesuai standar kriteria *convergent validity*.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk pengelolaan keuangan daerah (H3) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* di Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan, dengan demikian (H3) diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dhiyayani (2017) dan Syafrion (2015) yang mendeskripsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah, maka *good governance* juga dapat diperoleh atau terwujud dengan baik pula.

Sebuah organisasi diasumsi sudah beroperasi sebagaimana prinsip *good governance* jika pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana sesuai pada standar yang telah ditetapkan dan menyajikan pelaporan keuangan daerah yang andal dan relevan baik dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa manajemen keuangan yang baik akan dijadikan landasan penilaian implementasi *good governance*. Hal ini berarti keuangan yang dikelola dengan baik akan menjadi dasar penilaian penerapan *good governance*. Semakin baik pengelolaan laporan keuangan daerah maka penerapan *good governance* akan semakin baik pula dengan catatan suatu organisasi telah menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar dan tahapan yang ada dengan baik dan benar.

4.2.5 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ketiga variabel kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap penerapan *good governance*. Dapat dilihat dari hasil di atas diperoleh nilai R^2 , dimana nilainya sebesar 0,40 yang berarti bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah mampu menjelaskan variabel penerapan *good governance* secara simultan sebesar 40%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana hasil dari penelitian dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Lamongan telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sudah termasuk dalam kategori baik dan memuaskan.
2. Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* di Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Variabel sistem pengendalian internal pemerintah menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan *good governance* di Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan.
4. Variabel pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* di Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan.

5. Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap penerapan *good governance*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis memberikan saran diantaranya yaitu :

1. Bagi Lembaga Inspektorat
 - a. Membentuk atau menciptakan sistem pengendalian internal dalam lingkungan agar memperkuat fungsi utama Inspektorat sebagai pengawas lingkungan pemerintah daerah.
 - b. Meningkatkan kinerja bagi pegawai dan melakukan evaluasi secara rutin kepada pegawai maupun kepada temuan audit.
 - c. Mengembangkan teknologi informasi di lingkungan Inspektorat agar lebih transparan kepada masyarakat dan dapat dengan mudah mencari informasi baik itu tugas, fungsi, visi misi, struktur organisasi maupun prestasi yang pernah diraih.
 - d. Perlu adanya mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan saat pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah.
 - e. Disarankan supaya lebih meningkatkan atas prestasi yang telah dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan sehingga tindak penyalahgunaan dapat ditekan sehingga akan menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan aman.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel seperti Standar Akuntansi Pemerintah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Komitmen Organisasi, Auditor Internal, dan lainnya yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap *good governance*.
- b. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan tempat penelitian yang memiliki tugas lebih besar sebagai memperkuat analisa dan hasil penelitian lebih akurat.
- c. Selain mendapatkan data melalui penyebaran kuesioer kepada responden, disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara kepada responden yang terkait agar dapat memperluas pernyataan yang ada pada kuesioner serta mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nur. 2019. *Pengaruh Dana ZIS Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro (studi kasus pada mustahik Badan Amil Zakat Mojokerto)*. Skripsi. FEB. Ekonomi Pembangunan. Universitas Wijaya Putra. Surabaya.
- Anuar Sadat. 2019. *Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Medan Denai*. Jurnal Taushiah FAI-UISU, 9 (2), 14-19.
- Asih, Wulan. 2017. *Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Inisiatif Dan Orientasi Pembelajaran Serta Kemampuan Penyesuaian*". EKOBIS, 18(1), 96-105.
- Budisetyowati, Dwi Andayani. 2017. *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik*. *Social Justitia*, 1(1), 161-168.
- Cahyadi, Arif. 2016. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2), 479-494.
- Destriyani, V. 2015. *The effect of Good Governance, the Quality of Human Resources, and Information Technology Utilization Internal Control Performance Against Local Government Organisation (Studies in Regional Working Unit Kepulauan Meranti Government)*". Jom FEKON, 2(2), 1-15.
- Dewi, Nurmalia. 2015. *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Divisi Heat Treatment pada PT. Morita Tjokro Gearindo Jakarta*". Skripsi. FEB. Manajemen. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
- Dhiyavani, Siti Indah. 2017. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance*. Jom FEKON, 4(1), 1859-1872.
- Ghozali, Imam. (2014). *Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed)*.. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*, (Semarang: Undip, 2008), hal. 17.

Haura, G.A., Junita, A., & Meutia, T. 2019. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Good Governance Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada SKPK Di Kota Langsa)*. JENSI, 3(1), 33-52.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/19/10-lembaga-dengan-temuan-kasus-korupsi-terbanyak>, diakses pada tanggal 14 April 2020

<https://jatimtimes.com/baca/134934/20160203/154245/jadi-tersangka-dua-anggota-dprd-lamongan-dijebloskan-ke-bui>, diakses tanggal 12 Mei 2020

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur//d-4750008/kejari-tahan-bendahara-kpu-lamongan-tersangka-korupsi-dana-hibah-pilkada>, diakses tanggal 10 Mei 2020

<https://www.bppkpd.id/opini-wtp/>, diakses tanggal 10 Mei 2020

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-variabel/>, diakses tanggal 5 Mei 2020

Kristiana, Wiwik Lembang., Wahyuni, Made Arie., Sujana , Edy. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada LPD Se-Kecamatan Sukasada)*. E-Journal, 7(1).

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2019.

Lestiawan, H. Y., & Jatmiko, B. 2015. *Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)*. Maksimum, 5(1), 32-49.

Mailoor, Jefri Herbert., Sondakh, Jullie J., Gamaliel, Hendrik. 2017. *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APUP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud)*“.

Maryam, Neneng Siti. 2016. : *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 6(1), 1-18.

Nagor, T.F., Darwanis, dan Abdullah, S,. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten*

Aceh Barat (Studi Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat). Jurnal magister akuntansi Peraturan Bupati Lamongan No. 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Bupati Lamongan No. 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Prabawa, Sigit., Karamoy, Herman., Mawikere, Lidia. 2020. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa)*. Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 269-278.
- Rondonuwu, R.H., Tinangon, J.J., dan Budiarmo, N. 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, 3(4), 23-32.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sari, Weni Nirmala. 2017. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

(SPIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jom FEKON, 896-910.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Solimun, A. A., & Fernandes, N. (2017). *Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. Malang. UB Press.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2015 *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Suryo, P., & Jatmiko, B. (2017). *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*.

Sidanti, Heny. 2015. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun*. Jurnal JIBEKA, 9(1), 44-53.

Suryandari, E. 2015. *Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Total Quality Management Terhadap Penerapan Good Governance di Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Akuntansi & Investasi, 16(2), 145–154.

Syafrion, Fandra Yovano. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)*. JOM FEKON, 2(2), 1-14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Uundang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Verasvera, Febrina Astria. 2016. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Manajemen, 15(2), 137-162.

- Wuri, Rendra Risto. 2017. *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*.
- Yusniar, Darwanis, dan Abdullah, S,. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh)*. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2), 100-115.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian Skripsi

ANALISIS PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)

(Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI



Oleh :

Velia Brenda Yohana
NPM : 16011020

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2020**

Permohonan Pengisian Kuesioner

Lamongan, 24 Juni 2020

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan

Jl. Basuki Rahmad, Lamongan, Sukomulyo, Sukorejo, Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62215.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Wijaya Putra Surabaya, saya bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan)”.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini secara lengkap dengan sejujur-jujurnya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

Velia Brenda Yohana

Nomor : (diisi oleh peneliti)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur : tahun

Posisi / Jabatan :

Pendidikan Terakhir : SMP SMA D3
 S1 S2

Latar Pendidikan : Ekonomi Pembangunan
 Akuntansi
 Manajemen
 Lainnya (mohon diisi)

Lama Bekerja : < 1 tahun 1-5 tahun
 5-10 tahun 10-15 tahun
 >15 tahun

Keterangan : *) beri tanda centang pada jawaban yang dipilih

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Isilah identitas Bapak/Ibu/Sdr/i dengan lengkap.
2. Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon untuk membaca dan memahami setiap pertanyaan dalam kuesioner ini. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Bapak/Ibu/Sdr/i dengan memberikan tanda centang (✓) pada :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju
3. Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku maka dari itu diharap tidak ada yang sampai terlewat.
4. Dalam Bapak/Ibu/Sdr/i memberikan jawaban, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar dan dapat kami terima sepanjang sesuai dengan keadaan diri saudara yang sebenarnya.
5. Sebelum kuesioner ini dikembalikan, mohon periksalah kembali sampai Bapak/Ibu/Sdr/i yakin bahwa kuesioner sudah dijawab semua.
6. Bapak/Ibu/Sdr/i tidak perlu khawatir, karena kami menjamin untuk menjaga kerahasiaan jawaban.
7. Hasil kuesioner ini tidak akan mempengaruhi kedudukan dan evaluasi kerja Bapak/Ibu/Sdr/i, tetapi hanya untuk keperluan penelitian saja.

Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X₁)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
Indikator Masukan (<i>Input</i>)						
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan					
2	Bertanggung jawab dengan kewajiban yang sudah diberikan					
Indikator Proses (<i>Process</i>)						
3	Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan bidang di pekerjaan					
4	Merencanakan dan melaksanakan program di bidang pekerjaan					
5	Dalam merencanakan suatu kegiatan disesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan					
Indikator Keluaran (<i>Output</i>)						
6	Membuat laporan kepada pimpinan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan					
Indikator Hasil (<i>Outcome</i>)						
7	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan					
Indikator Dampak (<i>Impact</i>)						
8	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikato kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau					

	program					
9	Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan					

Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₂)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
Lingkungan Pengendalian						
1	Sudah menegakkan integritas dan nilai etika dalam lingkungan					
2	Sudah membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan					
3	Sudah tersedianya penetapan pengendalian internal					
Penilaian Resiko						
4	Selalu mengidentifikasi, menganalisisi dan mengelola risiko selama perubahan					

Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X₃)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
Akuntabilitas						
1	Lingkungan telah mentaati peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan akuntabilitas					
2	Menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing					
3	Pimpinan maupun pegawai mempertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) hasil dari suatu program / kegiatan / proyek yang telah dilakukan					
Value for Money						
4	Setiap program kerja yang dilaksanakan dan dikelola secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan anggaran					
5	Setiap program kerja yang dilaksanakan dan dikelola secara efektif sesuai dengan target yang direncanakan					
Pengendalian						
6	Rutin mengevaluasi kegiatan atau program yang telah dianggarkan dengan yang telah dicapai					

Variabel Penerapan *Good Governance* (Y)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
<i>Transparency</i>						
1	Pengambilan keputusan oleh pimpinan dilakukan secara terbuka					
2	Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan praktek terbaik untuk memastikan kualitas laporan keuangan					
<i>Responsiveness</i>						
3	Selalu mempertimbangkan aspirasi baik dari pihak internal maupun eksternal dalam menyusun suatu kebijakan					
4	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi					
<i>Consensus Orientation</i>						
5	Membuat kebijakan dengan memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak					
<i>Equity</i>						
6	Semua pihak telah diperlakukan secara adil tanpa membedakan jabatan, jenis kelamin maupun yang lainnya					
<i>Effectiveness and efficiency</i>						
7	Mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan membuahkan hasil					
<i>Accountability</i>						
8	Mempertanggungjawabkan semua tugas yang telah dilaksanakan kepada					

	pihak yang berkepentingan					
<i>Strategi Vision</i>						
9	Memiliki visi dan misi yang jauh kedepan sebagai penyelenggara pemerintahan					
10	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi dan memiliki kekuatan hukum					

Lampiran 2. Jawaban Responden

Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X₁)

Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.6	X1.7	X1.8	Total
1	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	30
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	3	4	4	4	4	4	4	5	4	36
7	4	5	4	4	5	4	4	5	4	39
8	3	4	4	4	4	4	4	5	4	36
9	3	5	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	5	5	4	4	4	5	5	4	4	40
13	5	5	4	4	4	5	5	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
17	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34
18	4	4	4	5	4	3	4	5	4	37
19	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	5	4	4	4	5	5	5	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
23	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
24	3	3	5	5	5	5	4	4	4	38
25	4	4	4	4	5	4	3	4	4	36
26	4	4	4	4	5	5	4	4	5	39
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	5	4	5	4	5	4	4	39
29	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
33	5	4	4	4	5	5	4	5	5	41
34	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33
35	4	5	5	5	4	5	5	4	4	41

36	4	5	4	4	5	4	4	5	4	39
37	3	4	4	4	3	4	3	3	3	31
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
39	4	5	4	5	5	4	4	4	5	40
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
41	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
42	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
43	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
45	3	4	3	3	4	4	4	4	4	33
46	4	4	3	3	4	4	4	4	3	33
47	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
48	3	4	3	3	4	3	3	3	4	30
49	4	4	4	3	4	5	4	5	5	38
50	4	5	4	4	5	5	4	3	3	37
51	4	5	4	3	4	4	5	4	3	36
52	3	4	4	4	5	4	4	5	4	37
53	4	5	5	4	5	4	4	5	5	41
54	5	5	5	5	4	5	4	4	5	42
55	4	5	4	4	4	3	4	4	4	36
56	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
57	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)

Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total
1	4	4	4	4	16
2	5	5	5	4	19
3	4	4	4	4	16
4	3	2	3	4	12
5	4	3	4	4	15
6	3	3	3	4	13
7	3	3	3	4	13
8	3	4	3	4	14
9	2	2	2	3	9
10	5	4	5	4	18
11	4	3	4	4	15
12	4	4	4	4	16

13	4	4	4	4	16
14	4	4	3	3	14
15	4	4	4	4	16
16	4	4	3	3	14
17	4	4	4	5	17
18	4	4	5	4	17
19	5	4	5	4	18
20	4	4	4	4	16
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	4	19
23	5	4	5	4	18
24	4	4	4	4	16
25	4	4	4	4	16
26	4	4	5	4	17
27	4	5	4	4	17
28	4	4	4	5	17
29	5	4	5	5	19
30	4	4	4	4	16
31	5	4	4	4	17
32	4	4	4	4	16
33	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	3	15
38	4	4	5	5	18
39	4	4	5	4	17
40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	4	16
43	4	4	4	4	16
44	4	4	4	4	16
45	4	4	3	3	14
46	4	3	3	3	13
47	4	4	4	4	16
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	4	3	3	4	14
51	4	4	4	3	15
52	3	3	3	5	14

53	4	5	4	4	17
54	4	5	4	5	18
55	4	3	4	4	15
56	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	16
58	4	4	4	4	16

Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)

Responden	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	4	4	4	26
6	5	5	5	4	5	4	28
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	4	4	4	4	4	25
9	4	4	4	4	4	4	24
10	5	5	5	5	5	5	30
11	4	4	5	4	4	4	25
12	3	3	3	4	4	4	21
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	5	5	4	4	26
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	5	5	4	4	26
17	5	4	4	4	5	4	26
18	4	4	4	4	4	4	24
19	5	5	5	5	5	5	30
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	5	25
22	4	4	4	5	4	4	25
23	5	4	5	5	5	5	29
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	5	5	4	26
26	4	4	4	5	4	5	26
27	4	4	4	4	4	3	23
28	4	4	4	5	4	4	25
29	5	5	4	5	5	5	29

30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	4	4	3	4	4	22
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	3	4	3	22
36	4	4	5	5	5	4	27
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	5	5	5	27
40	4	4	4	4	4	4	24
41	5	4	4	5	5	4	27
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	4	4	4	24
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	5	4	4	4	4	25
46	4	4	4	4	4	3	23
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	5	5	4	26
50	5	5	5	4	4	4	27
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	5	4	4	4	25
53	5	5	5	4	4	4	27
54	5	5	4	4	4	4	26
55	4	3	3	4	4	4	22
56	4	4	4	3	4	4	23
57	4	4	4	4	4	4	24
58	4	4	4	4	4	4	24

Variabel Penerapan *Good Governance* (Y)

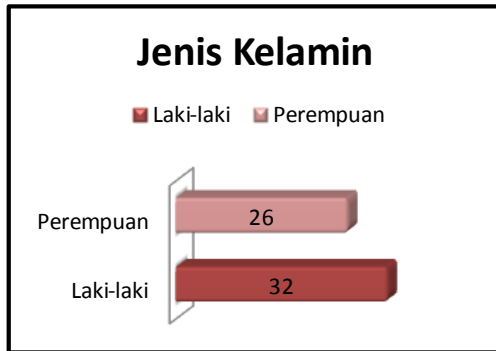
Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Total
1	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
6	5	5	5	3	4	4	4	4	5	4	43

7	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	45
8	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	43
9	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
10	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
11	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
12	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	40
13	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
14	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	42
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	42
17	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
18	4	3	5	4	4	5	4	3	4	4	40
19	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
22	3	4	3	3	2	3	4	4	5	5	36
23	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	45
26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	42
27	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38
28	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
29	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	36
35	3	4	4	4	4	3	3	5	4	4	38
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
37	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	38
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
39	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43
40	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
46	3	3	2	4	3	3	4	3	4	4	33

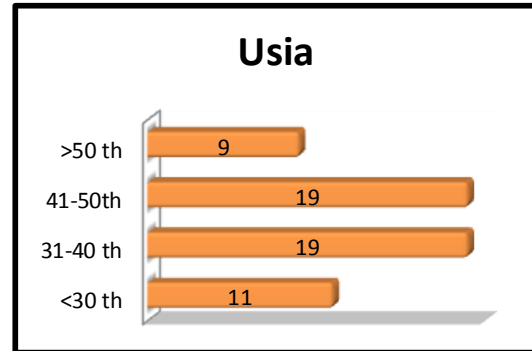
47	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
48	3	3	3	4	3	3	3	4	4	5	35
49	5	4	2	3	2	4	3	4	4	4	35
50	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48
51	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	46
52	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	47
53	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	46
54	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	45
55	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
57	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
58	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39

Lampiran 3. Karakteristik Responden

1. Berdasarkan Jenis Kelamin



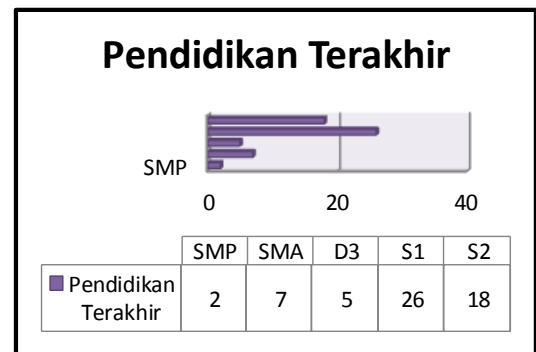
2. Berdasarkan Usia



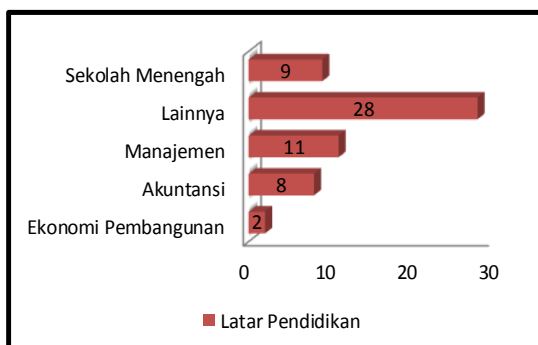
3. Berdasarkan Jabatan

Posisi/Jabatan	F	Persentase (%)
Inspektur	5	9
Sekretaris	1	2
Subbag Keuangan	1	2
Subbag Umum	1	2
Auditor Madya	7	12
Auditor Muda	9	15
Auditor Pertama	9	15
Staf Sekretariat	25	43

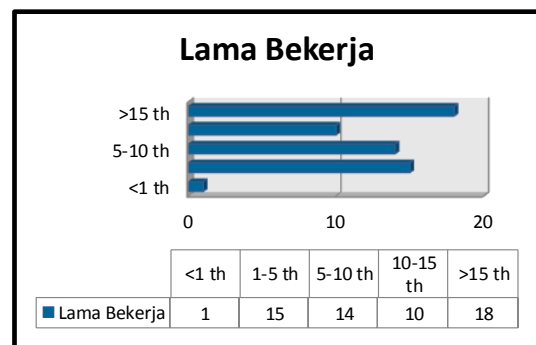
4. Berdasarkan Pendidikan Terakhir



5. Berdasarkan Latar Pendidikan



6. Berdasarkan Lama Bekerja



Lampiran 4. Deskripsi Variabel

1. Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS(5)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X1.1	0	0	0	0	9	15,5	43	74,1	6	10,3	58	100
2	X1.2	0	0	0	0	1	1,7	37	63,7	20	34,4	58	100
3	X1.3	0	0	0	0	7	12	44	75,8	7	12	58	100
4	X1.4	0	0	0	0	7	12	41	70,7	10	17,2	58	100
5	X1.5	0	0	0	0	2	3,4	40	68,9	16	27,5	58	100
6	X1.6	0	0	0	0	4	6,8	39	67,2	15	25,8	58	100
7	X1.7	0	0	0	0	8	13,8	39	67,2	11	18	58	100
8	X1.8	0	0	0	0	7	12	36	62	15	25,8	58	100
9	X1.9	0	0	0	0	5	8,6	41	70,7	12	20,6	58	100

2. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS(5)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X2.1	0	0	1	1,7	7	12	41	70,7	8	13,8	58	100
2	X2.2	0	0	2	3,4	10	17,2	40	68,9	6	10,3	58	100
3	X2.3	0	0	1	1,7	12	20,6	34	58,6	11	18,9	58	100
4	X2.4	0	0	0	0	9	15,5	42	72,4	7	12	58	100

3. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS(5)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X3.1	0	0	0	0	2	3,4	44	75,8	12	20,6	58	100
2	X3.2	0	0	0	0	2	3,4	47	81	9	15,5	58	100
3	X3.3	0	0	0	0	2	3,4	45	77,5	11	18,9	58	100
4	X3.4	0	0	0	0	3	5,1	41	70,7	14	24,1	58	100
5	X3.5	0	0	0	0	0	0	47	81	11	18,9	58	100
6	X3.6	0	0	0	0	3	5,1	48	82,7	7	12	58	100

4. Variabel Penerapan *Good Governance*

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		STS (1)		TS (2)		CS (3)		S (4)		SS(5)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Y.1	0	0	0	0	3	5,1	42	72,4	13	22,4	58	100
2	Y.2	0	0	0	0	4	6,8	40	68,9	14	24,1	58	100
3	Y.3	0	0	2	3,4	7	12	41	70,7	8	13,8	58	100
4	Y.4	0	0	0	0	4	6,8	45	77,5	9	15,5	58	100
5	Y.5	0	0	2	3,4	9	15,5	38	65,5	9	15,5	58	100
6	Y.6	0	0	0	0	6	10,3	45	77,5	7	12	58	100
7	Y.7	0	0	0	0	4	6,8	43	74,1	11	18,9	58	100
8	Y.8	0	0	0	0	3	5,1	48	82,7	7	12	58	100
9	Y.9	0	0	0	0	0	0	47	81	11	18,9	58	100
10	Y.10	0	0	0	0	1	1,7	48	82,7	9	15,5	58	100

Lampiran 5. Hasil Analisis Deskriptif

Hasil Output Uji Deskriptif

Variabel	Min	Max	Skewness	Exc. Kurtosis
X1	-2,266	2,466	0,267	0,113
X2	-3,464	2,117	-0,749	1,524
X3	-2,107	2,735	0,919	0,880
Y	-2,330	2,848	0,809	1,140

Lampiran 6. Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. *Convergent validity*

Variabel	Indikator	Kriteria	Loading Factor	Keterangan
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	KAPD 1	$\geq 0,5$	0,522	Terpenuhi
	KAPD 2	$\geq 0,5$	0,563	Terpenuhi
	KAPD 3	$\geq 0,5$	0,658	Terpenuhi
	KAPD 4	$\geq 0,5$	0,707	Terpenuhi
	KAPD 5	$\geq 0,5$	0,695	Terpenuhi
	KAPD6	$\geq 0,5$	0,709	Terpenuhi
	KAPD 7	$\geq 0,5$	0,765	Terpenuhi
	KAPD 8	$\geq 0,5$	0,605	Terpenuhi
	KAPD 9	$\geq 0,5$	0,709	Terpenuhi
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	SPIP 1	$\geq 0,5$	0,884	Terpenuhi
	SPIP 2	$\geq 0,5$	0,821	Terpenuhi
	SPIP 3	$\geq 0,5$	0,918	Terpenuhi
	SPIP 4	$\geq 0,5$	0,576	Terpenuhi
Pengelolaan Keuangan Daerah	PKD 1	$\geq 0,5$	0,786	Terpenuhi
	PKD 2	$\geq 0,5$	0,697	Terpenuhi
	PKD 3	$\geq 0,5$	0,678	Terpenuhi

	PKD 4	$\geq 0,5$	0,673	Terpenuhi
	PKD 5	$\geq 0,5$	0,752	Terpenuhi
	PKD 6	$\geq 0,5$	0,634	Terpenuhi
Penerapan <i>Good Governance</i>	GG 1	$\geq 0,5$	0,673	Terpenuhi
	GG 2	$\geq 0,5$	0,601	Terpenuhi
	GG 3	$\geq 0,5$	0,703	Terpenuhi
	GG 4	$\geq 0,5$	0,603	Terpenuhi
	GG 5	$\geq 0,5$	0,704	Terpenuhi
	GG 6	$\geq 0,5$	0,782	Terpenuhi
	GG 7	$\geq 0,5$	0,584	Terpenuhi
	GG 8	$\geq 0,5$	0,601	Terpenuhi
	GG 9	$\geq 0,5$	0,678	Terpenuhi
	GG 10	$\geq 0,5$	0,577	Terpenuhi

2. *Discriminant validity*

Cross Loading dan AVE

	KAPD	SPIP	PKD	GG	AVE
KAPD 1	(0,522)	0,327	-0,442	-0,069	0,664
KAPD 2	(0,563)	-0,309	-0,049	0,094	
KAPD 3	(0,658)	0,091	-0,382	0,259	
KAPD 4	(0,707)	0,376	0,169	-0,064	
KAPD 5	(0,695)	-0,069	0,278	0,142	
KAPD 6	(0,709)	-0,134	0,042	-0,221	
KAPD 7	(0,765)	-0,118	-0,210	-0,011	
KAPD 8	(0,605)	-0,237	0,210	0,052	
KAPD 9	(0,709)	0,076	0,283	-0,152	
SPIP 1	-0,044	(0,884)	0,116	-0,145	0,811
SPIP 2	0,015	(0,821)	-0,178	0,057	
SPIP 3	0,011	(0,918)	0,091	-0,122	
SPIP 3	0,029	(0,576)	-0,070	0,336	
PKD 1	-0,020	-0,059	(0,786)	0,011	0,705
PKD 2	-0,067	-0,030	(0,697)	0,047	
PKD 3	-0,126	-0,121	(0,678)	0,276	
PKD 4	0,178	-0,029	(0,673)	-0,195	

PKD 5	0,050	-0,044	(0,752)	-0,185	0,654
PKD 6	-0,015	0,317	(0,634)	0,065	
GG 1	-0,027	-0,393	0,129	(0,673)	
GG 2	0,098	-0,037	0,445	(0,601)	
GG 3	-0,302	0,362	-0,065	(0,703)	
GG 4	-0,088	0,113	-0,108	(0,603)	
GG 5	-0,350	0,216	0,090	0,704	
GG 6	-0,031	-0,016	-0,070	0,782	
GG 7	-0,215	0,296	0,081	0,584	
GG 8	0,517	-0,265	-0,266	0,601	
GG 9	0,211	-0,159	-0,055	0,678	
GG 10	0,288	-0,141	-0,178	0,577	

3. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	0,875	0,838	Reliable
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,882	0,816	Reliable
Pengelolaan keuangan daerah	0,855	0,796	Reliable
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,881	0,849	Reliable

Lampiran 7. Model Struktural (*Inner Model*)

1. Model *Fit And Quality Indices*

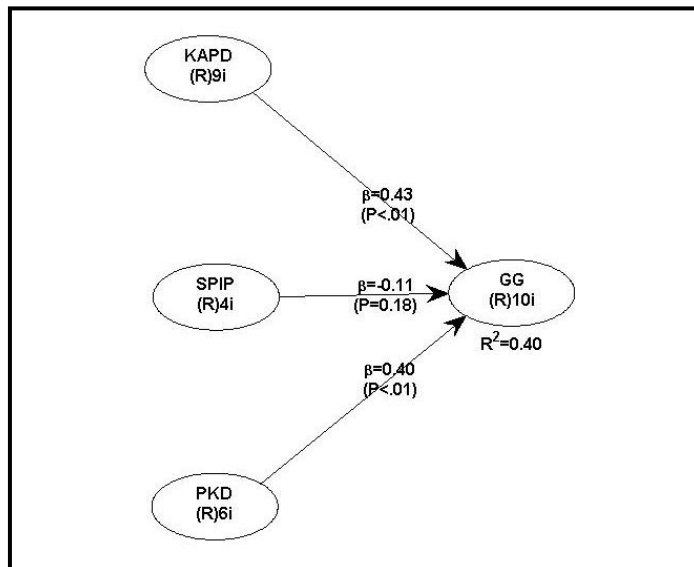
Model Fit And Quality Indices
Average path coefficient (APC) = 0,315, P=0,002
Average R-squared (ARS) = 0,404, P<0,001
Average block VIF (AVIF) = 1,051, acceptable if ≤ 5 , ideally $\leq 3,3$

2. *Model Fit Indices*

	Indeks	P-Value	Kriteria	Keterangan
APC	0,315	<0,002	P <0,05	Diterima
ARS	0,404	<0,001	P <0,05	Diterima
AVIF	1,051 <i>acceptable if <= 5</i>		AVIF <5	Diterima

Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis


1. Model Penelitian



2. *Indirect dan Total Effect*

Kriteria	Variabel	KAPD	SPIP	PKD	GG
<i>Path Coefficients</i>	KAPD				
	SPIP				
	PKD				
	GG	0,435	-0,115	0,395	
<i>P-Values</i>	KAPD				
	SPIP				
	PKD				
	GG	<0,001	0,183	<0,001	








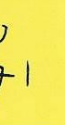
Lampiran 9. Copy Kartu Bimbingan

KARTU KONSULTASI	
SKRIPSI	
	
NAMA MAHASISWA	VELLA BRENDA YOHANA
NPM	16 011 020
FAKULTAS/JURUSAN	FEB / EKONOMI PEMBANGUNAN
PERIODE	2020
JUDUL	Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, SP1P & Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Good Governance.
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	
UNIVERSITAS WJAYA PUTRA	
Kampus : Jl. Raya Benowo Surabaya-60197, Telp. 031-7404404 Fax. 7404405	

KETENTUAN - KETENTUAN KEPEMBINGAN SKRIPSI

1. Setiap konsultasi kartu ini dibawa dan diserahkan kepada Pembimbing untuk ditanda tangani.
2. Setiap Mahasiswa tidak diijinkan pindah bimbingan.
3. Jika penulisan (Pembimbing) skripsi belum selesai , periode masa kepembimbingan telah berakhir, Mahasiswa diwajibkan melaporkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan membawa kartu konsultasi ini.
4. Pembimbing dimohon melaporkan , Mahasiswa bimbingannya yang tidak aktif kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Kartu konsultasi ini berlaku untuk 1 (satu) periode Pembimbing.
6. Mahasiswa yang tidak memperhatikan ketentuan – ketentuan di atas , akan ditanggguhkan pelaksanaan Bimbingan dan atau ujiannya.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NO.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Saran/Petunjuk Pembimbing	Persetujuan Pembimbing	Tanda Tangan	Catatan
1.	Jumat, 6 Maret 2020	Pengajuan Judul	Ditambah variabel X_3			
2.	Senin, 16 Maret 2020	Revisi Research Gap	Lanjut Bab I			
3.	Selasa, 7 April 2020	BAB I : Pendahuluan	Rumusan Masalah ditambah 1.			
4.	Kamis, 23 April 2020	BAB II : Landasan Teori	Kerangka Konseptual			
5.	Rabu, 13 Mei 2020	BAB III : Penelitian Metode	Koreksi pada tabel indikator			
6.	Senin, 8 Juni 2020	Mengajukan Kuisioner	Lanjut disebarakan			
7.	Selasa, 7 Juli 2020	BAB IV : Hasil Penelitian & Pembahasan	Pembahasan kurang.			
8.	Senin, 20 Juli 2020	BAB V : Penutup	Koreksi di kesimpulan.			

Lampiran 10. Copy Surat Izin Penelitian dari Universitas



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 101 /D-FEB/UWP/K-E/IV/2020 Surabaya, 28 April 2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. : Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Lamongan
Jl. Lamongrejo No. 29 Lamongan, Sidokumpul
Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan

Di – Tempat

Dalam rangka penulisan skripsi atau tugas akhir, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi di Universitas Wijaya Putra Surabaya, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu menerima mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Velia Brenda Yohana
NPM : 16011020
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tujuan : Penelitian Tugas Akhir
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

Akan mengadakan penelitian dengan judul :

**Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance.
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa kami.

Demikian permohonan ini, atas kebijaksanaanya kami sampaikan terima kasih.



Dekan,
Dr. Soenarmi., SE., MM.

Lampiran 11. Copy Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 04 Mei 2020

Nomor : 070/241/413.207/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian.**

Kepada
Yth. Sdr. Inspektur Kab. Lamongan

Di-

LAMONGAN

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya tanggal 28 April 2020, Nomor : 101/D-FEB/UWP/K-E/IV/2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **VELIA BRENDA YOHANA** dengan Judul kegiatan "**Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance. (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan)**", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,

M. RO'IS, SH., M.Hum.
Pembina
NIP. 19710615 200312 1 007

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/241/413.207/2020

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya tanggal 28 April 2020 Nomor : 101/D-FEB/UWP/K-E/IV/2020 Perihal Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : VELIA BRENDA YOHANA
b. NIK/NIM : 3524174803990001
c. Alamat : Desa Pajangan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sukodadi Kab. Lamongan
d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
e. Instansi/Organisasi : Universitas Wijaya Putra Surabaya
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul Proposal/Kegiatan : Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance. (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan)
b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Skripsi
c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Ekonomi Pembangunan
d. Penanggungjawab : VELIA BRENDA YOHANA
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 01 s.d 30 Juni 2020
g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : 1. Inspektorat Kab. Lamongan

Dengan ketentuan :

a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 04 Mei 2020

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan


M. RO'IS, SH., M.Hum.

Pembina

NIP. 19710615 200312 1 007

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya